

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS:
KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUNAS MUDA
DESA TELUK MERBAU KAB. SIAK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Sri Lestari

Nim : 0502172369

Program Studi

Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS:
KOPERASI UNIT DESA (KUD) TUNAS MUDA
DESA TELUK MERBAU KAB. SIAK)**

Oleh:

Sri Lestari

Nim. 0502172369

Program Studi

Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. Siak).”, Sri Lestari, NIM. 0502172369 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 6 Agustus 2021, skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 6 Agustus 2021

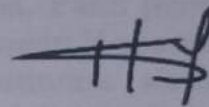
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



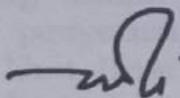
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN.2001077903

Sekretaris



Hendra Harmain, M.Pd
NIDN.2010057302

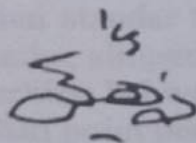
Anggota



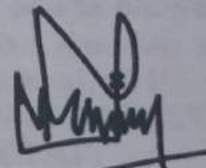
Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN.2007057602



Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIDN.2014068001



Dr. Zuhrihal, M. Nawawi, MA
NIDN.2018087601



Nurwani, SE., M.Si
NIDN.0126038901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN.2023017602

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sri Lestari**
NIM : 0502172369
Tempat/Tgl Lahir : Siak, 2 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. 2 No. B 47 Pulo Brayan Bengkel Medan Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. SIAK)** benar karya asli saya, kecualikutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 2 Juli 2021

Yang membuat pernyataan


SRI LESTARI



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Penyusunan Laporan
Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa (KUD)
Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. Siak)**

Oleh:


Sri Lestari

Nim. 0502172369

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Medan, Juli 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Andri Soemitra, MA

NIP. 197605072006041002

Pembimbing II




Kusmilawaty, SE, M.Ak

NIP.198006142015032001

Mengetahui

Ketua jurusan Akuntansi Syariah



Dr. H. Yenni Samri Juliati Nasution, MA

NIP.19790712009122003

ABSTRAK

Sri Lestari NIM 0502172369 Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. Siak).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa Tunas Muda Kecamatan Dayun. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Tunas Muda Kecamatan Dayun yang terdiri dari laporan neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan bank, dan catatan atas laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada laporan keuangan Koperasi Unit Desa Tunas Muda Kecamatan Dayun untuk mengetahui bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP. Metode wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperdalam kajian terhadap objek yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal sistematika penyajian laporan keuangan. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dan pembandingan dua unsur, yakni Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Tunas Muda tahun 2019, dan SAK ETAP tentang standar penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Koperasi unit Desa Tunas Muda belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP. Dari 13 point yang ada. KUD Tunas Muda hanya menerapkan 8 Point yang sesuai standar SAK ETAP diantaranya ialah : kas dan setara kas, aset tetap, hutang usaha, simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, SHU, dan laporan arus kas. Hal ini terlihat bahwa KUD Tunas Muda menerapkan SAK ETAP sebesar 61% dari keseluruhan point penerapan yang ada pada SAK ETAP.

Kata kunci: *laporan keuangan, SAK ETAP, KUD*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun)” dengan baik lancar. Adapun tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar S1 Akuntansi Syariah. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang yang istimewa, beliau adalah orang tua penulis yang sangat penulis cintai karena Allah SWT. Ayahanda **Rudi Purwanto** dan Ibunda **Khalidah** yang sangat besar jasanya kepada penulis mulai dari membesarkan, mendidik serta memberikan kesempatan kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta doa yang tulus dalam memberikan pendidikan yang sangat terbaik kepada penulis. Serta ucapan terima kasih penulis sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A**, selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu **Dr. Marliyah, M.Ag** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak **Dr. Fauzi Arif Lubis MA** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak **Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
7. Bapak **Hendra Harmain, SE, M.Pd**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
8. Bapak **Andri Soemitra MA**, selaku pembimbing skripsi I yang berkontribusi banyak dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti selama perkuliahan.
9. Ibu **Kusmilawaty M.Ak**, selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi II yang memberikan arahan dan dan bimbingan dengan sangat teliti.
10. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
11. Bapak **Setiyono**, selaku ketua pengurus Koperasi Unit Desa Tunas Muda yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
12. Kakak tercinta **Anita Pratiwi S.Pd** dan suami **Mhd. Firmansah Ismail S.Pd**, keponakan tersayang **Mhd. Khalid Zaydan**, serta sepupu yang turut menemani **Muhammad Azzam Al-Khairi, Muhammad Syafiq Akmal, Muhajir Al Furqan, Ghaniyyah Aufa Bilqis**, dan **Muhammad Fikri Rayyan Al khatiri**, Beserta seluruh keluarga ku tercinta, Abucik, Nenek, Bulek, Cik'yo, Ibu, dan oom. yang telah memberikan banyak bantuan doa dan materialnya serta motivasi yang kuat kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
13. Sahabat teristimewa **Wulan Asih Munazriyanti, Nurmaya sari, Sriguna damayanti, Asri Afhizah Lestari** dan **Purnama Sari Siregar** yang telah

berjuang bersama penulis hingga meraih gelar sarjana bersama-sama.

Semoga kita selalu menjadi sahabat selamanya.

14. Teman-teman seperjuangan AKS-E Stambuk 2017 yang sangat penulis banggakan, mereka yang memberikan penulis dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala dukungan kalian orang-orang terkasih dibalas oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungan serta keridhaan-Nya.

Akhirul kalam penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang diharapkan demi perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. *Amin*.

Medan, 2 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SRI LESTARI', written in a stylized, cursive script.

SRI LESTARI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat penelitian.....	4
 BAB II LANDASAN TEORI	 6
A. Kajian Teoritis	6
1. Penerapan SAK ETAP.....	6
2. Laporan Keuangan	11
3. Koperasi	15
4. Koperasi Unit Desa.....	27
5. Standar Akuntansi Koperasi	31
B. Kajian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Pemikiran	48
 BAB III METODE PENELITIAN	 50
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	50
C. Subyek Dan Obyek Penelitian.....	50
1. Subyek Penelitian	50
2. Obyek Penelitian.....	50
D. Jenis Data	51

1. Data Primer	51
2. Data Sekunder.....	51
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	51
1. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Umum Perusahaan	55
a. Sejarah Koperasi Unit Desa Tunas Muda.....	55
b. Azas dan Tujuan	56
c. Uraian Tugas Koperasi Tunas Muda	56
d. Aktivitas umum koperasi	59
e. Laporan Keuangan KUD Tunas Muda	59
B. Pembahasan	64
1. Neraca	65
2. Laporan Sisa Hasil Usaha/Laba Rugi	69
3. Laporan Perubahan Ekuitas	70
4. Laporan arus kas	72
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	40
Tabel 4.1 Neraca	57
Tabel 4.2 Laporan Sisa Hasil Usaha	59
Tabel 4.3 Laporan Perubahan Kekayaan.....	60
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas dan Bank	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUD Tunas Muda	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorng demi kepentingan bersama. Dengan kata lain koperasi merupakan suatu bentuk usaha di mana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Koperasi berlandaskan azas kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatannya, koperasi mengutamakan kesejahteraan.¹ Koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak berlebihan jika koperasi dianggap sebagai saka guru atau pilar utama perekonomian Indonesia. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap kegiatan ekonomi koperasi di maksudkan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Asas ini tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan koperasi yang merupakan kumpulan orang seorng, bukan modal.²

Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Pada periode 2017, jumlah unit dan anggota koperasi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan unit sekitar 4,41 persen, dan anggota sebesar 25.497.467 juta atau mencapai 21,80 persen. Di sisi lain, perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukan peningkatannya pertumbuhan prduktifitas UMKM rata-rata sebesar 5 sampai 7 persen pertahunya.³ Berdasarkan undang-undang no 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal

¹ Hidayati pratiwi. "analisis penerapan standar akuntansi keuangan pada koperasi karyawan bersama PT EPFM. Jurnal. FE, akuntansi, Universitas Bosowa, 2016 hal.16

² Kartika sari, *Mengenal Koperasi* (karanganom: nuri septina, 2019, cempaka putih), hal.2

³ Ikhsan."analisis penerapan sak etap dalam penyusunan lapora keuangan pada koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang. Skripsi. FEB, akuntansi, Universitas Muhammadiyah makassar, 2018, hal. 2

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴

Kebutuhan terhadap informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi koperasi tersebut tidak hanya muncul dari pihak eksternal koperasi, seperti kredito, supplier, pemerintah atau calon investor. Kebutuhan informasi tersebut juga muncul dari pihak internal organisasi. Pihak manajemen koperasi akan membutuhkan pula informasi keuangan berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan koperasi. Seperti jumlah beban bahan baku yang dikeluarkan, beban tenaga kerja dalam suatu periode, beban overhead pada periode terkait atau beban produksi dalam satu tahun.⁵ Dalam suatu jenis kegiatan ekonomi tentu akan menghasilkan suatu hasil akhir yang disebut juga laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum mempunyai arti hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.⁶

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud untuk berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.⁷ SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan entitas Negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP

⁴ Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2012 *tentang Perkoprasian* Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

⁵ Rudianto, *Akuntansi koperasi konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan* (Jakarta: 2006, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), hal. 13

⁶ Siti supinah “*penerapan SAK ETAP di UMKM studi kasus pada koperasi aspada yogyakarta*”, Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, 2015, hal. 2

⁷ Hendra harmain, Dkk., *Akuntansi syariah di Indonesia* (Medan: Madenatera, 2019), hal. 80.

memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.⁸

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini di maksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang dimaksud di sini yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk umum bagi pengguna eksternal. Dengan diterapkannya standar laporan keuangan tersebut, koperasi diharapkan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada di dalamnya. Sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta terciptanya laporan keuangan yang transparansi, akuntabilitas dan globalisasi bahasa laporan keuangan untuk tujuan mendorong koperasi yang lebih baik lagi.

Dari wawancara awal kepada ketua Koperasi Unit Desa Tunas Muda yang dilakukan oleh peneliti⁹, bahwasanya dalam penyusunan laporan keuangan ditemukan beberapa permasalahannya yakni terlihat bahwa terbatasnya sumber SDM di koperasi tersebut yang dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan standar, sementara itu, pengurus dari koperasi memiliki pengetahuan yang rendah tentang aturan penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Berdasarkan pernyataan di atas, penerapan SAK-ETAP perlu diterapkan pada Koperasi Unit Desa Tunas Muda untuk memudahkan koperasi dalam menyusun laporan keuangan sendiri sehingga dapat berguna bagi intern atau untuk mendapatkan dana. Mengingat pentingnya informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang nantiya digunakan sebagai pengambilan keputusan dan menyusun rencana di masa yang akan datang.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. Siak):”**

⁸ Ikhsan. "*analisis penerapan sak etap dalam penyusunan lapora keuangan pada koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang*. Skripsi. FEB, akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hal. 2

⁹ Wawancara dengan Setiyono, selaku Ketua KUD Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kab. Siak, pada 27 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Di dalam penelitian ini terlihat bahwa terbatasnya SDM di koperasi tersebut yang dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan standar
2. SDM yang ada tidak mengetahui dengan pasti/jelas apakah mereka menggunakan standar akuntansi berdasarkan SAK-ETAP atau tidak
3. Pengurus dari koperasi memiliki pengetahuan yang rendah tentang aturan penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Kuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan KUD tunas Muda desa Teluk Merbau?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) pada laporan keuangan KUD Tunas Muda desa Teluk Merbau.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan penempatan unsur-unsur atau elemen-elemen data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data keuangan ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data keuangan dapat tersaji dengan baik. Sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak serta agar dapat menambah pemahaman tentang penyajian laporan

keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi sarana penerapan akuntansi khususnya tentang laporan keuangan yang berdasarkan SAK-ETAP yang telah dipelajari semasa kuliah, serta mengetahui kondisi nyata dalam tata cara pembuatan, penyusunan, serta penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP.

b. Bagi perusahaan Koperasi Unit Desa Tunas Muda

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau sebagai masukan dalam pembuatan laporan keuangan, serta dapat menyempurnakan dan menambah keyakinan dalam penulisan laporan keuangan di KUD Tunas Muda Desa Teluk Merbau.

c. Bagi pembaca atau pihak lainnya

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Penerapan SAK ETAP

Ikatan akuntansi Indonesia pada tanggal 17 juli 2019, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 mei 2009. Alasan IAI menerbitkan standar ini adalah untuk mempermudah perusahaan kecil dan mengah (UKM) yang jumlahnya hampir dari 90% dari total perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan mereka.¹⁰ Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal
- b. Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

¹⁰ Ikhsan, *analisis penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang*, akuntansi, FEB, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hal. 5

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.¹¹

Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Unsur-unsur laporan, berdasarkan SAK ETAP adalah :

a. Neraca

Mengatur informasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan.¹²

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 3) Persediaan
- 4) Properti investasi
- 5) Aset tetap
- 6) Aset tidak berwujud
- 7) Utang usaha dan utang lainnya
- 8) Aset dan kewajiban pajak
- 9) Kewajiban diestimasi
- 10) Ekuitas

b. Laporan Laba Rugi

Mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba-rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Laporan laba rugi juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

¹¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public* (Jakarta: dewan standar akuntansi keuangan), hal. 2

¹² *Ibid.*, hal. 19

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Beban keuangan
- 3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- 4) Beban pajak
- 5) Laba atau rugi netto.¹³

c. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama satu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). Pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- 1) Laba atau rugi periode
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan

¹³ *Ibid.*, hal.23

- 4) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - a) Laba atau rugi
 - b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - c) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.¹⁴

d. Laporan Arus Kas

Mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendapatan.¹⁵

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi tentang pertimbangan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 26-27

¹⁵ *Ibid.*, hal. 28

- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK ETAP
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diharapkan
- 3) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- 4) Pengungkapan lain.

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan:

- 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- 2) Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai resiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya.

Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang:

- 1) Sifat
- 2) Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan¹⁶

Berikut firman Allah yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada:

Q.S An-Nisa :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58)

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan daftar untuk mengetahui jumlah kekayaan

¹⁶ *Ibid.*, hal.34-35

perusahaan pada periode tertentu, dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Dipandang dari sudut pandang yang berkepentingan, ada tiga jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan untuk manajemen, laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan, laporan keuangan untuk pihak-pihak khusus. Laporan keuangan untuk ketiga pihak tersebut disusun dan disajikan dari suatu proses akuntansi yang sama, yaitu merupakan produk dari sebuah system informasi akuntansi.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Tujuan-tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang:

- 1) Berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit
- 2) Membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan
- 3) Mengidentifikasi sumber daya ekonomi (asset), klaim atas sumber daya tersebut (kewajiban) serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan ekonomi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping manajemen perusahaan.

Para pemakai laporan akan menggunakan laporan keuangan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan,

membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.¹⁷

b. Komponen Laporan Keuangan

Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri dan bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1) Neraca

Neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi asset, kewajiban dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau *balance sheet* adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajiban atau utang, dan pihak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu neraca tepatnya dinamakan *statements of position*. Karena neraca merupakan potret atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu maka neraca merupakan status *report* bukan merupakan *flow report*.¹⁸

2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh laba. laporan laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha) adalah laporan tentang hasil

¹⁷ Riswan, Yolanda Fatrecia Kesuma, *analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan pt. budi satria wahana motor*, Universitas Bandar Lampung, 2014, hal. 95

¹⁸ *Ibid.*, hal. 96

usaha/operasi perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode akuntansi tertentu misalnya satu tahun.

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba-rugi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut:

- a) Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan *service*) diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
 - b) Bagian kedua menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum/administrasi (*operating expenses*).
 - c) Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi diluar usaha pokok perusahaan (*non operating/financial income dan expenses*).
 - d) Bagian keempat menunjukkan laba/rugi yang insidentil (*extra ordinary gain or loss*) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.¹⁹
- 3) Laporan arus kas

Laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 97-98

²⁰ *Ibid.*, hal. 98

3. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.²¹

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan.

there is no single definition (for cooperative) which is generally accept, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate whice have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti “tidak ada definisi tunggal (untuk koperasi) yang umumnya diterima, tetapi prinsip yang umum menjelaskan bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum”.

Definisi menurut hatta (bapak koperasi indonesia) koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. semangat tolong-menolong tersebut disorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan "seorang buat semua dan semua buat seorang".²²

Menurut undang-undang no 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang

²¹ David prastio, *Koperasi Unit Desa* (Kalimantan barat: 2019, CV Derwati Press) hal. 6

²² *Ibid.* hal. 8

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²³

Dari beberapa pengertian di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan di dalam perkumpulan tersebut mengandung asas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong-menolong di antara anggota koperasi.²⁴

b. Sejarah Singkat Koperasi

1) Koperasi Indonesia Pada Masa Jepang

Pada masa ini Jepang membangun koperasi milik mereka yang disebut *kumiai* dan bertujuan untuk mengeruk hasil kekayaan Indonesia untuk membiayai para tentara Jepang. Pada masa ini juga, koperasi menjadi sulit berkembang. Hal tersebut terlihat dari sulitnya untuk mendapatkan izin pendirian. Pendudukan Jepang yang telah menggantikan posisi Belanda di Indonesia mengubah banyak aspek susunan dan data di daerah bekas kuasa Belanda diatur menurut kebutuhan perang, dan tidak lagi merupakan suatu daerah pemerintahan. Pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 23 Tahun 1942 yang antara lain berisi ketentuan untuk meminta izin terlebih dahulu pada residen jika hendak mendirikan perkumpulan dan mengadakan rapat. Dengan adanya undang-undang ini, maka koperasi praktis tidak memiliki ruang gerak.

2) Koperasi Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pemberontakan gerakan 30S-PKI yang berhasil dilumpuhkan oleh TNI menjadi awal keruntuhan orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Pemerintahan orde lama dicap sebagai sistem yang tidak berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Keadaan koperasi Indonesia pada masa tersebut bisa dibilang cukup parah. Apalagi PKI bisa memasukkan idealisme mereka dalam koperasi melalui embel-embel kekeluargaan pada masa itu.

²³ Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2012 *tentang Perkoprasian* Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

²⁴ David Prastio, *Koperasi Unit Desa* (Kalimantan Barat: 2019, CV Derwati Press) hal. 9

Pada masa itu, koperasi sebagai salah satu roda perekonomian bangsa, ditelusur dari hasil penelusuran, pejabat menteri koperasi pada masa itu Achiadi dan beberapa stafnya diamankan.

Berikutnya terbentuk tatanan pemerintah di bawah soeharto. Seluruh aspek kehidupan dikembalikan pada jalur idealisme pancasila dan UUD 1945. Koperasi ditujukan agar kembali berperan utuh dalam mendukung pencapaian yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Kemudian kembali ditekankan penerapan bahwa koperasi harus berdasarkan asas yang berlaku yaitu:

- a) menumbuhkan dan menjaga dasar-dasar demokrasi
- b) Menumbuhkan dan menjaga kembali pemahaman bahwasanya koperasi harus mempunyai dasar swadaya untuk mencapai tujuan yang mulia
- c) Pembinaan pemerintah dalam hal ini diperlukan namun hanya terbatas pada hal yang dianggap penting saja

Penyusunan kebijaksanaan aturan tentang koperasi yang bermanfaat dalam memberikan dorongan untuk berdaya manfaat. Memersiapkan pengantian UU koperasi no. 14 karena dianggap tidak begitu relevan lagi dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Sebagai jalan keluar untuk melaksanakan asas yang akan diterapkan pada sistem perkoperasian Indonesia, maka pada bulan juli tahun 1966, berdasarkan keputusan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, sepakat diadakan mufakat nasional untuk kembali menata dasar koperasi serta rehabilitasi sistem koperasi, mengingat sebelumnya dianggap telah disusupi idealisme PKI.

Akhirnya terbentuk undang-undang tentang koperasi yang baru yaitu UU No. 12 tahun 1967 mengenai pokok pokok perkoperasian. Inilah yang menjadi landasan pokok dalam perkoperasian pada masa orde baru dan dianggap telah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Lebih lanjut sistemnya, dalam kabinet ampera koperasi bernaung di bawah dapertemen dalam negeri di bawah pembinaan direktorat jendral koperasi. Dalam beberapa kabinet, koperasi pernah pindah naungan kedapertemen transmigrasi dan koperasi. Namun semenjak kabinet

pembangunan IV koperasi berdiri sendiri di bawah kementrian koperasi dengan menteri pertamanya Bustanil Arifin SH.

Bahkan, gencarnya kembali menggiatkan koperasi pada masa orde baru, pernah ada pendidikan koperasi dengan nama Sekolah Koperasi Menengah Atas. Juga dikenal Akademi Koperasi (AKOP). Pada akhirnya pada 12 juli 1984 Soeharto meresmikan Institut Koperasi Indonesia di Jatinangor, Bandung.

3) Koperasi Indonesia Pada Masa Reformasi

Dalam era reformasi pemberdayaan ekonomi rakyat kembali diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil dan koperasi.

Untuk tujuan tersebut seperti sudah ditetapkan melalui GBHN tahun 1999. Pesan yang tersirat di dalam GBHN tahun 1999 tersebut bahwa tugas dan misi koperasi dalam era reformasi sekarang ini, yakni koperasi harus mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kecil, sarana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai sarana untuk memecah ketidakselarasan didalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataannya pembagian pendapatan yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui peran yang dapat diharapkan dari koperasi dalam rangka penyembuhan perekonomian nasional kiranya perlu diperhatikan bahwa di suatu sisi koperasi telah di akui sebagai lembaga solusi dalam rangka menangkal kesenjangan serta mewujudkan pemerataan, tetapi di sisi lain kebijakan makro ekonomi belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan-perubahan perekonomian dunia yang mengarah pada pasar bebas. Selama periode 2000-2003, secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, yaitu:

- a) Rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai perputaran koperasi per anggota yang kurang dari Rp.100.000,00 per bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari Rp.345.225,00.
- b) Efisiensi usaha yang relative rendah yang ditunjukkan dengan tingkat perputaran aktiva yang kurang dari 1,3 kali pertahun.
- c) Rendahnya tingkat profitabilitas koperasi.
- d) Citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program pemerintah.
- e) Kompetensi SDM koperasi yang relatif rendah
- f) Kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya.

Pemerintah di beberapa Negara berkembang pada umumnya turut secara aktif dalam upaya membangun koperasi. Keikutsertaan pemerintah Negara-negara sedang berkembang ini, selain didorong oleh adanya kesadaran untuk turut serta dalam membangun koperasi, juga merupakan hal yang sangat diharapkan oleh gerakan koperasi. Hal ini antara lain didorong oleh terbatasnya kemampuan koperasi di negara sedang berkembang, untuk membangun dirinya atas kekuatan sendiri.

Di era reformasi, kebijakan pengembangan koperasi menjadi tanggung jawab kementerian koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 09/M/2005 Tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan kementerian koperasi dan UMKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia.

Selain itu, kementerian koperasi dan UMKM juga menyusun program pengembangan kelembagaan koperasi. Program ini bertujuan mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas yang mampu melayani lebih dari 20

juta anggota koperasi secara kerkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai dasar koperasi.²⁵

c. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Pada peraturan perundang-undangan indonesia nomor 17 tahun 2012 pasal 4, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan kerkeadilan.²⁶

Menurut bung hatta selaku bapak koperasi, tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi pelaku UMKM di Indonesia.²⁷

Sementara fungsi koperasi sebagaimana disebut dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 4, adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota (pada khususnya) dan masyarakat (pada umumnya) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya
- 4) Berusaha mewujudkan dan melakukan pengembangan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasar pada azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁸

d. Jenis-Jenis Koperasi

1) Koperasi Menurut Fungsinya

a) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berfungsi untuk membeli atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai konsumen dengan harga yang relatif murah namun tanpa mengabaikan

²⁵ Dwi utami nuraini, *Badan usaha dan koperasi dalam perekonomian Indonesia* (Yogyakarta:istana media,2018) hal. 88-96

²⁶ Peraturan pemerintah no 17 tahun 2012 tentang perkoprasian pasal 4

²⁷ Dwi utami nuraini, *Badan usaha dan koperasi dalam perekonomian Indonesia* (Yogyakarta:istana media,2018) hal. 100

²⁸ *Ibid.*, hal. 100

kualitas. Dalam operasi konsumsi, laba yang diperoleh atau Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jumlah pembelian dari setiap anggotanya. Contoh dari koperasi jenis ini adalah KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia).

b) Koperasi distribusi (pemasaran)

Koperasi distribusi adalah koperasi yang berfungsi untuk mendistribusikan barang, dimana anggotanya berperan sebagai penjual barang dan jasa kepada konsumen. Dengan kata lain, anggota koperasi distribusi berperan sebagai pemasok barang atau jasa.

c) Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang menghasilkan sebuah produk tertentu yang akan diserahkan kepada distributor untuk dijual kepada konsumen. Dengan kata lain, kegiatan koperasi produksi adalah menampung barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh anggotanya. Contoh barang yang disediakan oleh koperasi produksi adalah tempe dan tahu, hasil kerajinan, maupun susu. Dengan demikian, contoh dari koperasi produksi misalnya koperasi susu atau koperasi hasil kerajinan.

d) Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Anggota koperasi jasa sendiri berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

e) Koperasi simpan pinjam (KSP)

Disebut juga dengan koperasi kredit, yaitu koperasi yang bertujuan untuk menyediakan uang bagi para anggotanya untuk berbagai keperluan. Saat ini banyak koperasi kredit tengah berkembang di Indonesia karena memang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia. Didalam koperasi sendiri dikenal beberapa jenis simpanan sebagai berikut:

(1) Simpanan pokok

Yaitu sejumlah uang yang dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. simpanan pokok berjumlah sama bagi setiap anggota.

(2) Simpanan wajib

Yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

(3) Simpanan sukarela

Yaitu simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung pada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.

2) Koperasi Menurut Tingkat Dan Luas Daerah Kerjanya

a) Koperasi primer

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya minimal berjumlah 20 individu.

b) Koperasi sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang terbentuk dari gabungan badan-badan koperasi sehingga memiliki cakupan wilayah yang luas dan anggota yang banyak jika dibandingkan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

- (1) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang memiliki anggota minimal 5 koperasi primer.
- (2) Koperasi gabungan, yaitu koperasi yang memiliki anggota paling sedikit 5 koperasi primer.
- (3) Koperasi induk, yaitu koperasi yang memiliki anggota minimal 3 koperasi gabungan.

3) Koperasi Menurut Status Keanggotaannya

a) Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya berperan sebagai produsen (menghasilkan suatu barang atau jasa tertentu).

b) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya berperan sebagai konsumen yang menggunakan atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya.²⁹

e. Prinsip Dan Asas Koperasi

Prinsip merupakan asas kebenaran yang menjadi okok dasar, panutan, atau ideologi dari sebuah badan usaha dalam berpikir dan bertindak. Dalam koperasi sendiri, prinsip diartikan sebagai asas atau garis haluan yang mendasari koperasi atau yang dijadikan sebagai penentuan dan pegangan oleh koperasi dalam praktik koperasi dalam keseharian. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5, prinsip koperasi Indonesia terdiri dari 7 poin sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Bersifat sukarela maksudnya setiap keanggotaan atau anggota memberikan modal mereka masing-masing secara sukarela untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sementara bersifat terbuka artinya siapapun bisa menjadi anggota koperasi dengan memenuhi persyaratan standar yang terdapat pada masing-masing koperasi. Siapun memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri ke dalam koperasi dan tidak bersifat memaksa.

2) Pengelolaan koperasi bersifat demokratis

Maksud dari pengelolaan bersifat demokratis adalah bahwa seluruh kegiatan operasional koperasi dilaksanakan secara transparan pada semua anggota koperasi. Untuk itu, pembentukan struktur koperasi disesuaikan dengan asas yang menjunjung tinggi demokrasi baik dalam hal

²⁹ *Ibid.*, hal. 101-106

penyelenggaraan rapat, pemilihan pengurus, penetapan pengelola dan tercermin pula dalam seluruh aktivitas koperasi.

- 3) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota

Seperti yang diketahui bahwa koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Atas dasar itu, maka dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota, koperasi berupaya semaksimal mungkin untuk berlaku adil dan merata, salah satunya dalam hal pembagian SHU. Karena Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan jasa dan modal dari setiap anggota, maka pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai dan dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan kata lain, pembagian SHU diberikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan kerja masing-masing anggotanya.

- 4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

Yang dimaksud pembelian balas jasa anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia yaitu jika modalnya sedikit, maka pemberian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, pemberian balas jasa dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri. Jadi, balas jasa tersebut diberikan sesuai dengan keadilan, keseimbangan, dan keterbatasan seberapa besar modalnya yang telah diberikan oleh anggota.

- 5) Kemandirian

Maksud dari kemandirian ialah bahwa koperasi mengajarkan untuk setiap orang belajar mandiri, dimana setiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab atas setiap usaha itu sendiri. Di samping itu, anggota koperasi juga dituntut berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri karena koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan juga tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain.

6) Pendidikan perkoperasian

Maksudnya di dalam koperasi masing-masing anggota dididik untuk berwirausaha dan mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat. Pendidikan perkoperasian ini di maksudkan untuk memberikan bekal bagi anggota koperasi untuk berwirausaha atau bekerja setelah mereka terjun ke dalam masyarakat. Selain wirausaha, pendidikan koperasi juga di maksudkan untuk mematangkan anggota berkenaan dengan pemahaman koperasi, keorganisasian koperasi, dan lain-lain.

7) Kerjasama antarkoperasi

Kerjasama antar koperasi bermakna bahwa koperasi yang lebih tinggi tingkatnya harus membimbing koperasi yang baru terbentuk. Selain itu, kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya dengan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan anggota dari setiap koperasi dan dapat memajukan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama.

Selain memiliki 7 (tujuh) prinsip, koperasi juga memiliki 2 (dua) asas utama sebagai berikut:

a) Asas kekeluargaan

Maksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggotanya seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban demi kepentingan keluarga besar koperasi. Setiap anggota koperasi juga diharapkan mempunyai kesadaran untuk melakukan yang terbaik disetiap kegiatan koperasi dan dalam segala hal yang dianggap berguna untuk kemaslahatan seluruh anggota koperasi.

b) Asas gotong royong

Maksud asas gotong royong adalah bahwa setiap anggota koperasi memiliki sikap toleran, tidak boleh memiliki sifat egois atau individualis, serta mau dan mampu untuk bekerja bersama-sama dengan anggota lainnya.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hal 106-111

f. Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia

1) Meningkatkan pendapatan anggota

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi adalah keuntungan para anggota. Semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota itu.

2) Menciptakan lapangan pekerjaan

Koperasi meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, seperti di bidang kerajinan, pertanian, dan pertokoan. Dibukanya lapangan usaha koperasi berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia pada umumnya.

3) Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Kegiatan koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam.

4) Turut mencerdaskan bangsa

Usaha koperasi bukan hanya kegiatan pendidikan terhadap para anggota. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan manajemen. Dengan demikian, koperasi turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

5) Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha.

Koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, koperasi pertanian dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mempersatukan usaha para petani untuk memenuhi kebutuhannya, seperti usaha pengadaan pupuk, bibit, alat pertanian, dan menjual bersama produksi pertanian.

6) Menyelenggarakan kehidupan ekonomi

Pada setiap kegiatan, koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus, melainkan berdasarkan keinginan para anggota, yaitu terlebih dahulu harus dimusyawarakan. Hal ini merupakan pencerminan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi.³¹

Berikut firman Allah tentang Kerjasama yang menjadi landasan kerja pada koperasi:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-maidah: 2)

4. Koperasi Unit Desa

a. Perkembangan Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, sejak dikeluarkan Inpres no. 18 tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian, KUD tidak lagi menjadi koperasi tunggal di tingkat kecamatan. Program-program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan, seperti distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan KUD di Indonesia secara umum mengalami penurunan kinerja dan tidak sedikit yang hanya tinggal papan nama.

Melihat fenomena ini, KUD layak diperankan kembali sebagaimana konsep awalnya. Perlu dilakukan revitalisasi, baik intern KUD sendiri maupun *stakeholder*, serta pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan reformasi KUD sebagai

³¹ *Ibid.*, hal 111-113

lembaga ekonomi berparadigma baru yang mampu melindungi dan memfasilitasi usaha anggota dalam system bisnis dari hulu sampai hilir. Mengembalikan peran kundi KUD, merupakan konsekuensi tuntutan pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat pedesaan, termasuk membantu berbagai program pemerintah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi memegang peranan penting sebagai salah satu pondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Salah satu jenis koperasi yang memiliki peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD).

KUD secara umum bergerak di wilayah pedesaan. Awalnya koperasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian karena kebanyakan masyarakat desa bekerja di sektor agraria atau pertanian.

Dalam perkembangannya, KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan.

KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi, termasuk KUD, adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dengan hadirnya KUD masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang tak sedikit. Kebutuhan hidup semakin terpenuhi, kesejahteraan terjamin, bahkan pada aspek yang lebih luas masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya.

b. Peran KUD Bagi Pembangunan Desa dan Ekonomi Nasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa KUD memiliki peran dan manfaat yang luar biasa pentingnya bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang perekonomian. Sektor pertanian terus didorong agar lebih produktif serta mampu swasembada.

Begitupun dengan sektor-sektor lainnya seperti peternakan, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Berbagai sector tersebut di pacu agar mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Selain berperan penting dalam bidang perekonomian, KUD juga memiliki peran krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diketahui masyarakat desa memiliki tingkat kesejahteraan yang masih kalah dibanding masyarakat kota.

Dengan adanya KUD diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik dan bergerak positif yang tentunya memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

c. Dukungan Pemerintah

KUD yang dibentuk di pedesaan dan beranggotakan masyarakat desa tak bergerak sendiri dalam segala aktivitasnya. Pemerintah telah memberi dukungan secara hukum, moril, dan finansial. Pemerintah ikut bertanggungjawab memberdayakan KUD yang ada guna mendorong pembangunan di kawasan pedesaan,

Peran pemerintah dalam mendorong perkembangan dan jangkauan KUD adalah dengan mengucurkan bantuan berupa hibah, kredit, dan bantuan lain. Pemerintah juga mengadakan pelatihan bagi masyarakat desa agar lebih produktif lagi dalam bidang ekonomi.

Melalui support dan bantuan secara langsung dari pemerintah diharapkan KUD dan masyarakat desa secara umum mampu bangkit, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

d. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi KUD

Guna mendorong peran KUD agar lebih optimal, maka perlu ditumbuhkan dan dikembangkan semangat serta pola pikir kewirausahaan. Masyarakat perlu diarahkan agar memanfaatkan KUD sebagai penampung hasil produksi (pertanian, perkebunan, perikanan, dll) dan kemudian dipasarkan.

Agar KUD terus berjalan dan memiliki peran penting, maka perlu diupayakan beberapa hal berikut:

- 1) Peningkatan modal dari berbagai pihak. Modal perasional KUD bisa diperoleh dari pemerintah (pusat/daerah), lembaga swasta maupun bantuan pribadi anggota serta dermawan.
- 2) Peningkatan kualitas SDM dan perbaikan manajemen KUD. Tiap pengurus atau orang yang terlibat dalam KUD harus berjiwa professional dan punya moralitas yang tinggi. Masyarakat dijadikan pengawas operasional KUD.
- 3) Adanya dukungan anggota. KUD bisa terus berkembang bila anggota benar-benar memanfaatkan KUD sebagai penyedia kebutuhan tempat pemasaran, dan lain sebagainya.
- 4) Memberikan pelayanan optimal bagi anggota serta masyarakat yang membutuhkan. KUD hendaknya tak hanya fokus pada simpan pinjam, namun perlu menjangkau lebih luas seperti pemasaran, penyedia jasa, produksi, distribusi, dan konsumsi bagi anggota dan masyarakat luas.
- 5) Melibatkan generasi muda agar turut serta membangun KUD. Pelatihan, magang atau menjadikan generasi muda sebagai pengurus/anggota bisa menjadi satu point penting bagi pengembangan KUD.³²

Berikut Firman Allah tentang etos kerja di sector koperasi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³² David prastyo, *koperasi unit desa* (Kalimantan barat: CV derwati press, 2019) hal.48-54

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-nahl : 90)

5. Standar Akuntansi Koperasi

a. Pedoman Standar Akuntansi Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum dengan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi haruslah dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat pada umumnya. Penyusunan laporan keuangan secara jujur, tertib dan wajar merupakan perwujudan dari penerapan prinsip tersebut.

Pada awalnya standar akuntansi yang digunakan mengacu pada standari akuntansi yang diatur oleh ikatan akuntan Indonesia melalui pernyataan standar akuntansi keuangan 27: akuntansi perkoperasian. Akan tetapi, pedoman ini kemudian dicabut pada 8 april 2011 melalui pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan 8 (PPSAK) tentang pencabutan PSAK 27; akuntansi perkoperasian. Alasan dari pencabutan tersebut karena dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industry tertentu, di karenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS.

Pemerintah melalui kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia yang berperan dalam membangun dan mengembangkan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, telah mengatur suatu pedoman akuntansi koperasi, yaitu:

1. PermenKopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sector rill
2. PermenKopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi.

3. PermenKopUKM No. 14/Per/M.kukm/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembuatan syariah oleh koperasi.

b. Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Rill

Koperasi sektor rill merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha dibidang jasa, usaha perdagangan dan usaha produksi. Ini memiliki karakteristik utama dimana:

- 1) Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama.
- 2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.
- 3) Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya.
- 4) Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- 5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Dalam keaktifan memanfaatkan pelayanan koperasinya, partisipasi anggota koperasi konsumen dalam bentuk aktif membeli barang/jasa kebutuhan konsumsi, anggota koperasi jasa dalam bentuk aktif memberikan jasa yang bukan merupakan barang jadi tidak untuk diperjualbelikan, anggota koperasi produsen dalam bentuk aktif membeli barang/jasa untuk kebutuhan input produksinya, dan anggota koperasi pemasaran dalam bentuk aktif menjual hasil produknya kepada koperasi untuk dipasarkan secara bersama-sama dan atau melalui koperasi.

Untuk itulah diatur koperasi sektor rill sebagai suatu sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi sektor rill yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik.

Pedoman akuntansi ini mengatur perlakuan yang timbul dari hubungan pelayanan antara koperasi dengan anggotanya, transaksi antara koperasi dengan

non anggota dan transaksi lain yang spesifik yang terjadi pada koperasi sektor riil. Transaksi koperasi dengan anggota merupakan hubungan khusus yang disebut hubungan pelayanan, sementara transaksi dengan non anggota disebut hubungan bisnis. Perlakuan akuntansi dari hubungan ini harus dipisahkan, karena harus mencerminkan implementasi prinsip, tujuan, dan fungsi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. Untuk itulah dalam laporan keuangannya perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan kondisi dan prestasi koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan berbisnis dengan non anggota.

Standar akuntansi yang dipakai bagi koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), sedangkan koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, seperti yang telah menerbitkan surat utang koperasi, obligasi koperasi, menerima modal penyertaan dan koperasi yang membentuk badan hukum lain (perseroan terbatas), wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum).

Yang dimaksud Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purposes financial statement) bagi pengguna eksternal. Misalnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.
- 3) Sedangkan entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
- 4) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal
- 5) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Ini merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi sektor riil. Untuk itu laporan keuangan harus dapat menyajikan:

- 1) Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu.
- 2) Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu.
- 3) Informasi penting lain yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan panjang.

Laporan keuangan yang diterbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa:

- 1) Neraca
- 2) Perhitungan Hasil Usaha
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan karakteristik kualitatif SAK-ETAP sebagai berikut:

- 1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna

- 2) Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan.

- 3) Materialitas

Informasi yang disajikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) mempengaruhi keputusan yang diambil

4) Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu)

5) Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

6) Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban lebih tinggi.

7) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukup jika ditinjau dari segi relevansi.

8) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan

antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

9) Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10) Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami manfaat informasi informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

c. Sisa Hasil Usaha

Undang-undang no. 25 tahun 1992 pasal 45 telah mengatur Sisa Hasil Usaha (SHU) dimana:

- 1) Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota

Lebih detail dalam PermenKopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil menjelaskan bahwa SHU adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan.

SHU setelah dikurangi dengan cadangan pengembangan usaha dibagikan kepada anggota, pengurus, pengawas, karyawan dan pembagian lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti

dana pendidikan anggota dan dana pembangunan daerah. Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian SHU yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban lancar setelah mendapat persetujuan rapat anggota tahunan. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi. Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan,

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU. Ini bukan semata-mata mengukur besaran laba melainkan juga menggambarkan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non anggota. Terkait dengan pembagian SHU, beberapa prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

- 1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakikatnya, SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi dengan anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam kasus koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkan untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memilahkan yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non anggota.

- 2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan intensif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota harus ditetapkan berapa presentase untuk jasa modal misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% untuk jasa transaksi usaha. Sebenarnya belum ada

formula baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan koperasi itu sendiri. Apabila total modal koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan anggota (bukan donasi ataupun dana cadangan) maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi 50%. Hal ini perlu diperhatikan untuk tetap menjaga agar karakter koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi.

4) SHU anggota dibayar secara tunai

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. SHU yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1) SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik maupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2) SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi itu sendiri, umumnya dapat terdiri dari:

- 1) Cadangan koperasi
- 2) Jasa anggota
- 3) Alokasi pengurus
- 4) Alokasi pendidikan anggota
- 5) Alokasi sosial
- 6) Alokasi pembangunan lingkungan/daerah

Komponen diatas bukanlah aturan baku yang harus diikuti. Setiap koperasi dapat menentukan sendiri komponen untuk ditetapkan dalam anggaran dasar yang disepakati oleh rapat anggota, termasuk alokasi proporsi kuantitatif masing-masing komponen.

Untuk menghitung pembagian SHU per anggota dapat digunakan rumus (sitio & tamba, 2011):

$$\text{SHU pa} = \text{SHU Jasa Usaha Anggota} + \text{SHU Jasa Modal Anggota}$$

$$\text{SHU pa} = \frac{V_a}{VUK} \times JUA + \frac{S_a}{TMS} \times JMA$$

$$\text{SHU Usaha Per Anggota} = \frac{V_a}{VUK} \times JUA$$

$$\text{SHU Modal per anggota} = \frac{S_a}{TMS} \times JMA$$

Keterangan:

SHU pa	= SHU per anggota
Va	= Volume (usaha) anggota
VUK	= Volume Usaha Koperasi
JUA	= Jasa Usaha Anggota
Sa	= Simpanan anggota
TMS	= Total Modal Simpanan
JMA	= Jasa Modal Anggota

Berikut hadist Nabi yang memiliki penjelasan tentang adanya standar tentang penerapan akuntansi koperasi:

فَالأَوَّلُ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا مُتَفَقُّ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Nabi صلى الله عليه وسلم, sabdanya: *“Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.”* (Muttafaq ‘alaih).

B. Kajian Terdahulu

Untuk mengkaji penelitian “analisis penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan (studi kasus: koperasi unit desa (KUD) tunas muda desa teluk merbau kecamatan dayun)” maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu yang dipakai sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Supinah (2015)	Penerapan SAK-ETAP di UMKM	Data analisis dengan	a. SAK-ETAP untuk standar penyusunan laporan keuangan

		studi kasus pada Koperasi Aspada Yogyakarta	menggunakan pendekatan analisis kualitatif	<p>koperasi dinilai kurang untuk diterapkan pada koperasi. Hal ini dikarenakan untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK-ETAP masih mengacu pada PSAK no.27</p> <p>b. Pihak koperasi serba usaha “aspada” belum melakukan penerapan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi serba usaha “ASPADA”</p> <p>c. Laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi serba usaha “ASPADA” belum menyajikan laporan keuangan secara penuh.</p>
2	Ikhsan (2018)	analisis penerapan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang.	Deskriptif kualitatif	<p>a. Laporan keuangan yang telah disajikan oleh koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang hanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi</p> <p>b. Laporan keuangan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dibuatkan</p> <p>c. Pada neraca koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang</p>

				<p>terdapat pos-pos yang belum sesuai dengan SAK ETAP diantaranya pos aktiva tetap belum mencantumkan antara kendaraan, tanah dan gedung, penyisihan piutang tak tertagih juga belum dicantumkan dalam neraca, dan pos akumulasi penyusutan aset juga belum dicantumkan pada neraca</p> <p>d. Konsep kewajiban pada neraca juga masih belum memisahkan antara kewajiban kepada anggota dan non anggota</p> <p>e. Pengakuan pendapatan yang dilakukan koperasi simpan pinjam berkat cabang pinrang masih menggunakan prinsip kas, yaitu mengakui pendapatan ketika kas diterima atau dikeluarkan. Untuk konsep aset, kewajiban, ekuitas, dan beban sudah menggunakan prinsip akrual, yaitu pengakuan atas aset, kewajiban, ekuitas, dan beban ketika terjadinya transaksi bukan kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan pengukuran yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yang berlaku.</p>
--	--	--	--	--

				<p>f. Konsep beban dasarnya sudah sesuai dengan SAK ETAP, namun pengklasifikasiannya masih belum tepat. Beban piutang tak tertagih belum tercantum dalam laporan laba rugi.</p>
3	Ratih Sepriana (2015)	Analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi (studi kasus pada KUD bendosari kepanjen kidul kota blitar)	Deskriptif kualitatif	<p>Laporan keuangan pada koperasi unit desa bendosari telah menerapkan SAK ETAP dengan baik, akan tetapi masih ada kekurangan dalam penerapannya, diantaranya:</p> <p>a. Tak ada akun potongan pembelian dalam pembukuan keuangan kud bendosari. Apabila ada diskaun langsung di kurangkan ke harga beli. Padahal SAK ETAP mensyaratkan bahwa diskaun tidak termasuk dalam harga penjualan dan pembelian</p> <p>b. Penilaian asset terakhir dilakukan pada tahun 2012. Hal ini mempengaruhi kualitas keandalan dan relevansi dari laporan keuangan pada koperasi unit desa bendosari</p> <p>c. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak dijelaskan metode apa yang digunakan</p>

				<p>dalam penyusunan laporan hasil usaha, laporan perubahan modal dan laporan arus kas</p> <p>d. Jangka waktu dari piutang tak tertagih tidak dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Padahal informasi tersebut sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan</p> <p>e. Berdasarkan PSAK ETAP. Tujuan dari cadangan koperasi, pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan (SHU), jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum dilunasi, jenis donasi (terikat atau tidak terikat), harusnya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi pada koperasi unit desa bendosari tujuan dari dana cadangan tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya.</p> <p>f. Kegiatan bisnis untuk non anggota tidak diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, serta aktifitas koperasi mempromosikan ekonomi anggotanya tidak diungkapkan pada laporan keuangan. Harusnya semua informasi ini</p>
--	--	--	--	---

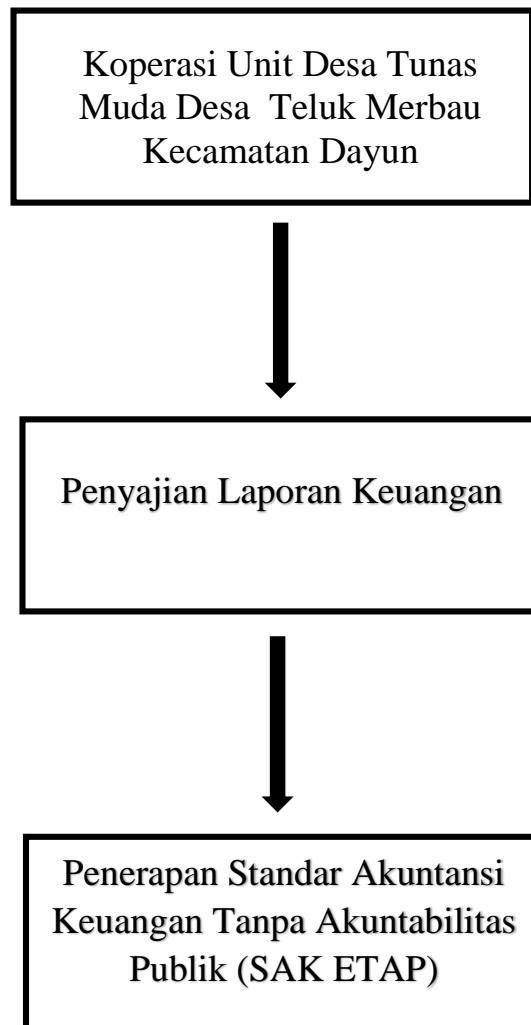
				dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan.
4	Muhammad Ivan Nurfadilah (2018)	pemahaman dan penyajian standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) pada <i>Home Industry</i> kripik tempe di sentra kripik tempe karangtengah prandon ngawi (tahun 2015-2016).	Deskriptif kualitatif	<p>a. Terdapat 8 <i>home industry</i> kripik tempe yang sudah memahami SAK ETAP, dan hanya 1 yang <i>home industry</i> yang tidak memahami SAK ETAP. Pemahaman mereka tentang SAK ETAP hanya sebatas dari sosialisasi dinas usaha mikro dan koperasi kabupaten ngawi dan juga pemilik <i>home industry</i> tidak memperhatikan tentang kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban pada usahanya</p> <p>b. Ada 6 <i>home industry</i> yang membuat laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuanganpun hanya melakukan pencatatan selanjutnya membuat laporan keuangan sesuai kebutuhan usahanya. Jadi masih terbatas dalam laporan laba/rugi dan 1 <i>home industry</i> yang membuat laporan neraca, tetapi belum memahami konsep dari SAK ETAP itu sendiri. hal tersebut karena tidak adanya pihak yang melakukan pelatihan</p>

				dan <i>follow up</i> tentang pencatatan mengenai SAK ETAP
5	Qurratul Ainia (2017) .	Penerapan akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public pada Koperasi Pegawai Republic Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.	Kualitatif	<p>a. Dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI Suka Makmur telah menerapkan SAK ETAP</p> <p>b. Pada laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI suka makmur belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Karena dalam penyusunan laporannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Misalnya dalam penyusunan laba rugi koperasi tidak mencantumkan beban pajak. Beban pajak tidak menjadi pos tersendiri namun dimasukkan ke dalam beban umum dan administrasi. Sedangkan dalam laporan kas yang disusunnya masih belum secara jelas melakukan klarifikasi ke dalam arus kas operasi, investasi, dan pendanaan.</p> <p>c. Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh KPRI suka makmur tidak melakukan penyusunan catatan</p>

				<p>atas laporan keuangan dan hanya menyusun neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Padahal keberadaan catatan atas laporan keuangan sangatlah dibutuhkan karena dapat diketahui kebijakan apa saja yang telah digunakan oleh pihak koperasi.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, untuk memeperjelas penelitian yang akan dilakukan, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik memiliki peran penting dalam laporan keuangan pada KUD Tunas Muda. Adanya SAK ETAP ini diharapkan dapat membantu setiap perusahaan yang laporan keuangannya belum menjadi umum untuk dicatat sesuai standar yang ada. Dalam arti, jika SAK ETAP dapat dilaksanakan secara memadai dan berkelanjutan, maka kesalahan-kesalahan yang ada dalam laporan keuangan sebelumnya dapat diminimalisir sedini mungkin. serta diharapkan adanya penulisan laporan keuangan sesuai standar tersebut dapat berguna untuk perbaikan atas pencatatan sebelumnya untuk kebaikan yang akan datang. Dalam hal

ini, staf SDM yang memahami laporan keuangan sesuai SAK ETAP khususnya bendahara perusahaan merupakan salah satu bagian organisasi perusahaan yang penting, yang bertujuan untuk menunjang laporan keuangan sehingga dapat tercatat dengan baik sesuai standar dari SAK ETAP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.³³ Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.³⁴

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda yang terletak di desa Teluk Merbau kecamatan Dayun Kabupaten SIAK. Penelitian ini akan dilakukan pada Maret 2021.

C. Subyek Dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang diambil oleh penulis adalah Bapak Setiyono selaku ketua dari Koperasi Unit Desa Tunas Muda.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah laporan keuangan KUD Tunas Muda. Penelitian difokuskan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada laporan keuangannya.

³³ Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Meda Publishing, 2015) hlm. 27

³⁴ *Ibid.*, hlm. 28

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua KUD Tunas Muda yaitu Bapak Setiyono.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga, yakni dari kepustakaan elektronik (*Ipusnas*) dengan mempelajari literature-literatur. Bacaan-bacaan dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta sumber-sumber yang mendukung. Diantaranya adalah jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan penerapan SAK-ETAP, serta arsip laporan keuangan KUD Tunas Muda pada tahun 2019.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi terhadap laporan keuangan koperasi unit desa tunas muda yang telah dipublikasikan. untuk

mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

b. wawancara

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai secara langsung bapak pimpinan KUD tunas muda untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti dan mendapatkan pemahaman yang utuh dan makna yang tepat.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.³⁵

Proses analisis data diantaranya ialah:

³⁵ Dr. sandu siyoto, *dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta:Literasi media publishing, 2015) hal. 120

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan. Dalam prosesnya Data yang diperoleh dalam penggalan data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Proses dalam Penyajian data dilihat dari gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaa, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³⁶ Proses setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peniliti dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 122-124

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Koperasi Unit Desa Tunas Muda

KUD tunas muda merupakan wadah kegiatan perekonomian pedesaan yang dimiliki oleh warga desa. Melalui koperasi inilah masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan dapat semakin meningkat, lebih-lebih di daerah transmigrasi yang tingkat masyarakatnya belum stabil

KUD Tunas Muda dibentuk pada tanggal 06 agustus 1990 dengan memperoleh penegasan badan hukum pada tanggal 20 Maret 1991 nomor: 1556 dan diperbaharui pada tahun 1996 dengan memperoleh badan hukum nomor: 105/BH/PAD.KWK.4/5.I/II/1996 dengan wilayah kerja meliputi Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Pertama kali berdiri, KUD Tunas Muda hanya melakukan kegiatan waserda, usaha pupuk dan usaha angkutan. Namun karena usaha keras pengurus dan anggota, akhirnya KUD Tunas Muda mengalami banyak peningkatan di antaranya penjualan waserda (berbentuk minimarket), penjualan pupuk, jasa angkutan, jasa tandan buah segar, jasa usaha simpan pinjam dan jasa umum.

Secara historis keanggotaan KUD Tunas Muda berasal dari seluruh kepala keluarga mantan transmigrasi UPT VII Sei Buatan. Pengurus yang ada pada saat ini adalah untuk masa kerja 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Setiyono
Sekretaris	: Dedi Arianto, ST
Bendahara	: H Suharto

Sedangkan yang menjadi badan pengawas yang berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan organisasi maupun kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Ketua : Sukardi
 Anggota 1 ; Jaini
 Anggota 2 : Surawan

Pada tahun 2019 ada penambahan 2 orang karyawan yang ditempatkan di bidang IT dan Marketing sehingga jumlah karyawan yang direncanakan sebanyak 8 orang, penambahan karyawan ini terkait dengan perubahan sistem yang membutuhkan tenaga tambahan agar kegiatan KUD Tunas Muda bisa berjalan sesuai yang kita harapkan.

b. Azaz dan Tujuan

- 1) Koperasi berdasarkan kekeluargaan bergotong royong
- 2) Koperasi bertujuan:
 - a) Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian
 - b) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya
 - c) Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Selanjutnya melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud dan tujuan. Semuanya dalam artian yang seluar-luasnya dengan mengindahkan undang-undang peraturan yang berlaku.

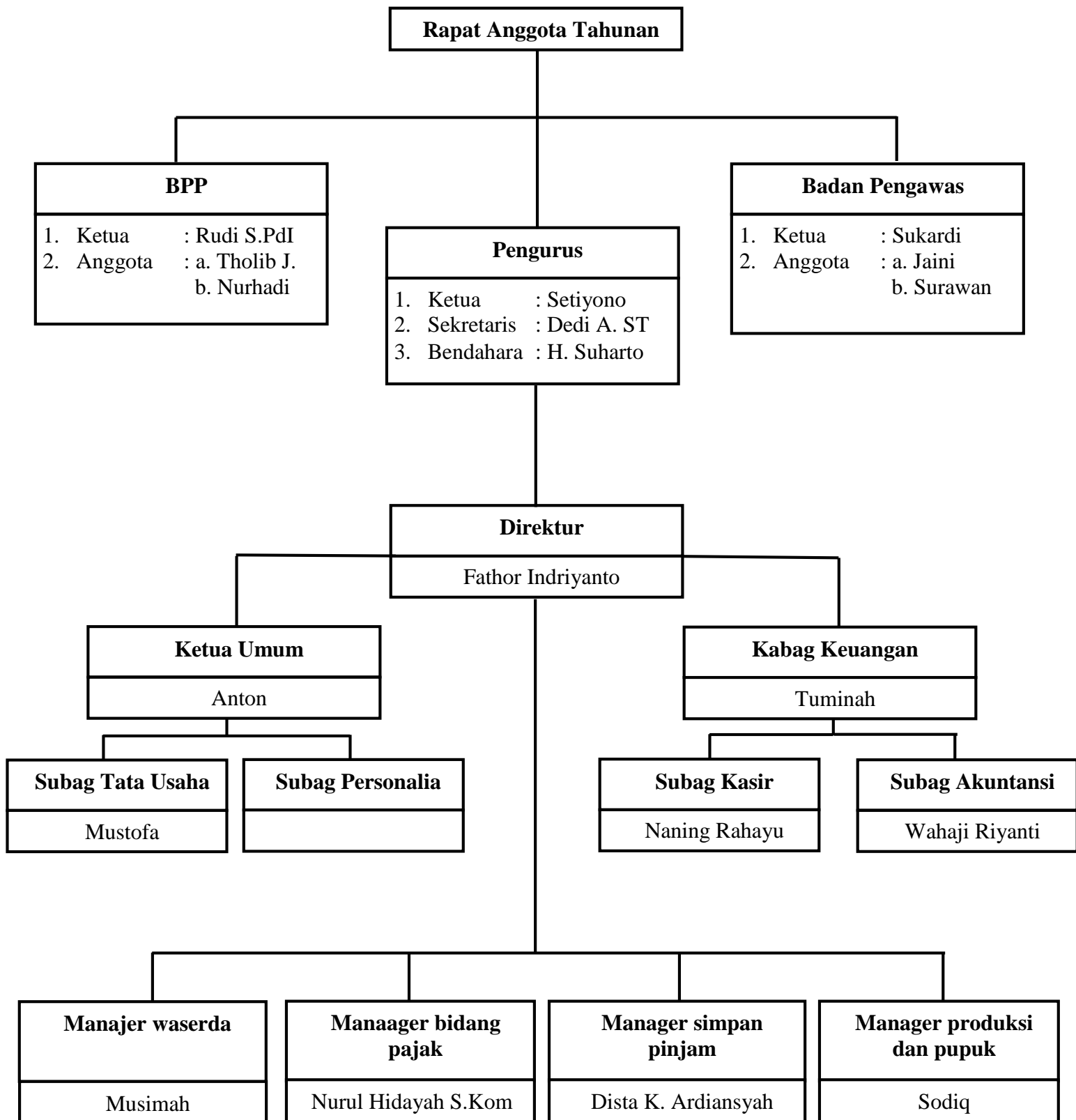
c. Uraian Tugas Koperasi Tunas Muda

Adapun uraian tugas pada koperasi tunas muda ialah sebagai berikut:

- 1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi, segala keputusan ditentukan oleh anggota yang disampaikan melalui forum rapat anggota. Penyelenggaraan rapat anggota sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun.
- 2) Pengurus, memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi. Pengurus ini hanya merupakan pemegang mandate yang dipilih,

diberhentikan dan diangkat oleh anggota. Membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran umah tangga dan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

- 3) Ketua, memiliki tugas memimpin koperasi dan mengkoordinasikan anggota pengurus, mewakili koperasi dan mengkoordinasikan anggota pengurus, mewakili koperasi dalam pengadilan dan melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- 4) Sekretaris, pertanggungjawabannya tentang administrasi koperasi, melengkapi kelengkapan koperasi, mengarahkan tugas karyawan serta menyusun rancangan rencana kerja organisasi.
- 5) Bendahara, bertugas masalah keuangan, mengatur pembukuan keuangan, menyusun anggaran setiap bulan, mengatur penerimaan dan pengeluaran uang, menyusun laporan keuangan serta mengendalikan anggaran.
- 6) Badan pengawas, memiliki tugas pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus tentang pengelolaan koperasi, meneliti dan membuat catatan yang ada apada koperasi tentang hasil pengawasan.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KUD Tunas Muda

d. Aktivitas umum koperasi

Kegiatan usaha KUD Tunas Muda Antara lain:

1) Unit usaha waserda

Dalam unit ini terbagi dua bagian yaitu waserda khusus alat-alat bangunan, pertanian, dan waserda yang menjual kebutuhan rumah tangga (minimarket).

2) Unit usaha pupuk

Menyediakan pupuk yang diperlukan anggota dengan berbagai merk yang dibutuhkan.

3) Unit usaha angkutan TBS

Menyediakan mobil pake up untuk mengangkut barang-barang dagangan dan mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit para anggota dari perkebunan sampai ketempat pengolahan.

4) USP (Unit Usaha Simpan Pinjam)

Koperasi unit desa tunas muda juga memberikan jasa simpan pinjam kepada anggota dan non anggota di mana pengembalian pinjamannya dengan cara diangsur, unit ini juga dikatakan juga lembaga pembiayaan. Alasan dikatakan demikian karena usaha yang dijalankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

e. Laporan Keuangan KUD Tunas Muda

1) Neraca

Berikut laporan neraca KUD Tunas Muda:

Tabel 4.1

KUD MANDIRI TUNAS MUDA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 2019

KETERANGAN	31 DES 2019	31 DES 2018
Aset		
Aset Lancar		

Kas dan setara kas	4.070.127.828.65	4.998.912.347.90
Piutang usaha	3.656.125.957.69	3.698.151.831.79
Penyisihan piutang ragu-ragu	-	-
Piutang dana-dana	-	43.330.647.00
Persediaan	-	166.563.665.00
Jumlah aset lancar	<u>7.726.253786.65</u>	<u>8.906.958.491.69</u>
Aset tidak lancar		
Penyertaan	201.351.700.00	201.231.700.00
Aset tetap, nilai buku	182.727.499.72	414.598.237.97
Aset lain-lain	20.000.000.00	20.000.000.00
Jumlah aset tidak lancar	<u>404.079.199.72</u>	<u>635.829.937.97</u>
Jumlah Aset	<u>8.130.332.986.37</u>	<u>9.542.788.429.66</u>
Liabilitas & kekayaan bersih		
Liabilitas Lancar		
Simpanan anggota	2.691.177.492.02	3.763.526.682.08
SHU Bagian Anggota	6.284.221.48	7.722.842.18
Hutang dana-dana SHU	11.582.810.78	11.993.678.20
Hutang dana-dana lainnya	2.767.238.395.00	353.655.802.90
Biaya YH dibayar	60.000.000.00	75.000.000.00
Jumlah liabilitas lancar	<u>5.536.282.919.28</u>	<u>4.211.899.005.36</u>
Liabilitas jangka panjang		
Hutang lain-lain	301.239.019.00	3.129.582.022.00
Jumlah kewajiban jk panjang	<u>301.239.019.00</u>	<u>3.129.582.022.00</u>
Ekuitas		
Simpanan pokok	4.135.000.00	4.355.000.00
Simpanan wajib	143.955.550.00	140.513.550.00
Simpanan wajib khusus	3.075.691.00	3.075.691.00
Cadangan	1.943.466.865.85	1.878.069.335.55

Donasi	11.800.000.00	11.800.000.00
SHU Tahun Berjalan	186.197.941.24	163.493.825.75
Jumlah kekayaan bersih	<u>2.292.811.048.09</u>	<u>2.201.307.402.30</u>
Liabilitas + Ekuitas	<u>8.130.332.986.37</u>	<u>9.542.788.429.66</u>

Sumber: laporan Audit tahun 2019

2) Laporan Sisa Hasil Usaha

Berikut laporan sisa hasil usaha KUD Tunas Muda:

Tabel 4.2

KUD MANDIRI TUNAS MUDA

LAPORAN SISA HASIL USAHA

UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Pendapatan		
Pendapatan usaha	51.108.834.967.00	69.499.178.675.00
Harga pokok penjualan		
Persediaan awal	166.563.665.00	177.432.575.00
Pembelian	<u>49.780.612.034.51</u>	<u>68.222.348.988.00</u>
Barang tersedia untuk dijual	49.947.175.699.51	68.399.217.898.00
Persediaan akhir	-	(166.563.665.00)
Jumlah	<u>49.947.175.699.51</u>	<u>68.233.217.898.00</u>
Beban Usaha	171.210.895.00	230.771.995.00
Harga pokok penjualan	50.118.386.594.51	68.463.989.893.00
SHU kotor	990.448.372.49	1.035.188.782.00
Beban umum dan administrasi	808.250.431.25	878.644.956.25
SHU bersih	<u>182.197.841.24</u>	<u>156.543.825.75</u>
Pendapatan luar usaha		
Pendapatan lain-lain	4.000.000.00	6.950.000.00
Jumlah	4.000.000.00	6.950.000.00

SHU Tahun Berjalan	<u>186.197.941.24</u>	<u>163.493.825.75</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------------

Sumber: laporan audit 2019

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Berikut laporan perubahan kekayaan bersh KUD Tunas Muda:

Tabel 4.3

KUD MANDIRI TUNAS MUDA
LAPORAN PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Keterangan	Kekayaan Bersih	Kumulatif Saldo Laba Ditahan	Jumlah Kekayaan Bersih
Saldo per 31 Desember 2018			
Simpanan pokok	4.355.000.00	-	4.355.000.00
Simpanan wajib	125.141.550.00	15.372.00.00	140.513.550.00
Simpanan wajib khusus	3.075.691.00	-	3.075.691.00
Donasi	11.800.000.00	-	11.800.000.00
Cadangan	1.801.252.642.55	76.816.693.00	1.878.069.335.75
SHU tahun berjalan	-	163.493.825.75	163.493.825.75
Saldo kekayaan bersih per 31 Desember 2018	1.945.624.883.55	255.682.518.75	2.201.307.402.30
Perubahan selama tahun 2019			
Kenaikan simpanan pokok	4.355.000.000	(40.000.00)	4.315.000.00
Kenaikan simpanan wajib	140.513.550.00	4.442.000.00	143.955.550.00
Kenaikan simpanan wajib khusus	3.075.691.00	-	3.075.691.00
Donasi	11.800.000.00	-	11.800.000.00
Cadangan	1.878.069.335.55	65.397.530.30	1.943.466.855.85
Pembagian SHU Tahun 2018	163.493.825.75	(163.493.825.75)	-
SHU Tahun 2019	-	186.197.941.24	186.197.941.24

Saldo kekayaan bersih per 31 Desember 2019	2.201.307.402.30	91.503.645.79	2.292.811.048.19
---	-------------------------	----------------------	-------------------------

Sumber: laporan Audit tahun 2019

4) Laporan Arus Kas

Berikut laporan arus kas KUD Tunas Muda:

Tabel 4.4

KUD TUNAS MUDA
LAPORAN ARUS KAS DAN BANK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2019

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2018
AKTIVITAS OPERASIONAL		
SHU Tahun Berjalan	186.197.941.24	163.493.825.75
Penyesuaian :		
-Penyusutan Aset Tetap	31.870.738.25	33.182.758.25
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan modal kerja	218.068.679.49	196.676.584.00
-Piutang Usaha	42.0325.874.10	393.767.475.00
-Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	-	(80.107.502.00)
-Piutang Dana-Dana	43.330.647.00	600.000.000.00
-Persediaan	166.563.665.00	10.868.910.00
-Simpanan Anggota	(1.072.349.190.06)	(237.965.819.76)
-SHU Bagian Anggota	(1.438.620.70)	(48.168.442.00)
-Hutang Dana-Dana SHU	(410.867.42)	11.204.173.00
-Hutang Dana-Dana Lainnya	2.413.582.592.10	(23.317.794.00)
-Biaya YH. Dibayar	(15.000.000.00)	15.000.000.00
-Hutang Lain-Lain	(2.828.343.003.00)	-
Arus Kas Dan Bank Dari (Untuk) Aktivitas Usaha	(1.033.970.223.49)	837.957.584.24

AKTIVITAS INVESTASI		
-Penyertaan	(120.000.00)	-
-Koreksi Akk. Penyusunan	(17.133.700.00)	-
-Penambahan Aset Tetap	-	(230.000.000.00)
-Pengurangan Aset Tetap	217.133.700.00	-
-(Penambahan) Pengurangan Aset Lain-lain	-	2.108.979.222.000
Arus Kas Dan Bank (Untuk) Aktivitas Investasi	199.880.000.00	1.878.979.222.00
AKTIVITAS PENDANAAN		
-Simpanan Pokok	(40.000.00)	-
-Simpanan Wajib	3.442.000.00	15.372.000.00
-Simpanan Wajib Khusus	-	-
-Cadangan	65.397.530.30	76.816.693.00
-Pembagian SHU 2017	(163.493.825.75)	(192.041.731.70)
Arus Kas Dan Bank Dari (untuk) Aktivitas Pembiayaan	(94.694.295.45)	(99.853.038.70)
Penambahan (Penurunan) Saldo Kas Dan Bank	(928.784.518.94)	2.617.083.767.54
Saldo Kas Dan Bank Awal Tahun	4.998.912.347.90	2.381.828.580.36
Saldo Kas Dan Bank Awal Tahun	4.070.127.828.96	4.998.912.347.90

Sumber: laporan Audit tahun 2019

B. Pembahasan

Laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam penyusunan laporan keuangan tentu terdapat standar untuk penyusunannya. Dasar ini digunakan agar seluruh laporan keuangan perusahaan sama dan dapat dimengerti. Dasar penyusunan untuk laporan koperasi terdapat standar baru sebagai pengganti PSAK No. 27 yaitu standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang disebut SAK ETAP.

Di dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan lengkap berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Bentuk laporan keuangan koperasi unit desa tunas muda dapat dilihat pada halaman sebelumnya. Adapun laporan yang disusun oleh KUD Tunas Muda terdiri dari: Neraca, Laporan sisa hasil usaha, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas dan bank, Catatan atas laporan keuangan

1. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain, persediaan, property investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas.

Berdasarkan dari tabel 4.1 terlihat secara keseluruhan total liabilitas+ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.130.332.986.37 dengan akun yang tertulis yaitu: kas dan setara kas Rp.4.070.127.828.65.-, piutang usaha Rp. 3.656.125.957.69.-, penyertaan Rp.201.351.700.00.-, aset tetap nilai buku Rp. 182.727.499.72.-, aset lain-lain Rp.20.000.000.-, simpanan anggota

Rp. 2.691.177.492.02.-, SHU bagian anggota Rp. 2.284.211.48, hutang dana-dana SHU Rp. 11.582.810.78.-, hutang dana dana lainnya Rp. 2.767.238.395.00.-, biaya yang harus dibayar Rp. 60.000.000.00.-, hutang lain-lain (jangka panjang) Rp. 301.239.019.00.-, simpanan pokok Rp.4.135.000.00.-, simpanan wajib Rp.143.955.550.00.-, simpanan wajib khusus Rp. 3.075.691.00.-, cadangan Rp.1.49.466.865.85.-, donasi Rp. 11.800.000.00.-, SHU tahun berjalan Rp. 186.197.941.24.-.

a. Kas Dan Setara Kas

berdasarkan SAK ETAP setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Berikut contoh ayat jurnal yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang melibatkan kas sebagai berikut:

1) Ayat jurnal yang melibatkan transaksi kas masuk

Kas	xxx	
Pendapatan		xxx

2) Transaksi yang melibatkan transaksi kas keluar

Beban listrik	xxx	
Kas		xxx

Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan kas dan setara kas KUD Tunas Muda terlihat bahwa kas diakui sebagai aset, dicatat berdasarkan nilai nominalnya, disajikan dalam pos aset lancar, dan perinciannya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa entitas harus mengukur

nilai persediaan pada nilai mana yang telah rendah Antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Berikut contoh ayat jurnal yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang melibatkan persediaan:

Harga pokok penjualan	xxx
Cadangan bahan baku rusak	xxx

Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan persediaan KUD Tunas Muda terlihat bahwa persediaan diakui sebagai aset, disajikan pada pos aset lancar, rincian dari persediaan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Tetapi didalam laporan neraca di atas, pos persediaan yang tidak memiliki jumlah, hal ini menjadikan kekeliruan bahwa persediaan dari KUD Tunas Muda pada tahun 2019 tidak ada, di dalam catatan atas laporan keuangan seharusnya memberikan informasi tentang persediaan yang tidak diketahui jumlahnya, namun demikian KUD Tunas Muda tetap menulis persediaan dengan jumlah Rp.0.- diinformasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan, barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan *administrative*, dan diharapkan akan digunakan dari satu periode. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Selain itu, aset tetap juga harus disusutkan. Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan espektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih Antara lain

- 1) Metode garis lurus (*straight line method*)
- 2) Metode saldo menurun (*diminishing balance method*)
- 3) Metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*)

Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan aset tetap KUD Tunas Muda terlihat bahwa aset tetap diakui sebagai aset tetap, dicatat

berdasarkan nilai nominalnya, disajikan dalam pos aset tetap, dan perincian dari aset tetap diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

d. Hutang usaha

Hutang usaha adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa kewajiban harus diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Berikut contoh ayat jurnal yang dibuat sehubungan dengan transaksi yang melibatkan hutang usaha:

Hutang	xxx	
	Kas	xxx

Dari analisis penerapan SAK ETAP terhadap penulisan hutang usaha KUD Tunas Muda terlihat bahwa hutang usaha diakui sebagai hutang, dicatat berdasarkan nilai nominalnya, disajikan dalam pos kewajiban, dan perincian dari hutang usaha diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Dapat dilihat dari keseluruhan bahwa KUD Tunas Muda menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca secara relevan dengan laporan keuangan, dan di dalam Standar SAK-ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Selanjutnya di dalam SAK-ETAP entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, hal ini telah sesuai dengan yang telah dilakukan oleh KUD Tunas Muda. Selain itu, di dalam SAK ETAP juga tidak mengharuskan untuk menentukan format dan urutan terhadap pos-pos yang disajikan, hal ini dilakukan KUD Tunas Muda dengan tidak menyajikan laporan neraca berdasarkan likuiditas, sebenarnya bagi pengguna hal ini memiliki kelebihan di mana bagi pengguna informasi laporan keuangan dapat memahami secara mudah tentang laporan neraca yang dibuat oleh KUD Tunas Muda, sehingga dari laporan neraca yang ada pengguna laporan keuangan kurang memahami dan kurang memberikan informasi yang andal dan relevan.

2. Laporan Sisa Hasil Usaha/Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan Antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba persaham. Unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan beban laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi atau investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi neto.

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat secara keseluruhan total SHU tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar Rp. 186.197.941.24.-, dengan akun yang terdapat yaitu: pendapatan usaha Rp. 51.108.834.967.00.-, persediaan awal Rp. 166.563.665.00.-, pembelian Rp. 49.780.612.034.51.-, barang tersedia untuk dijual Rp.49.947.175.699.51.-. beban usaha 171.210.895.00.-, harga pokok penjualan Rp. 50.118.386.594.52.-, SHU kotor Rp. 990.448.372.49.-, beban umum dan administrasi Rp. 808.250.431.25.-, pendapatan lain-lain Rp. 4.000.000.00.-.

Dari penjelasan di atas maka di sisa hasil usaha KUD Tunas Muda pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 186.197.941.24.-, dengan berdasarkan hasil penjumlahan dari SHU bersih 182.197.841.24 dengan pendapatan lain-lain sebesar Rp.4.000.000.00.-.

Laporan laba rugi disusun untuk memberikan gambaran atas kinerja entitas dalam suatu periode akuntansi, dalam KUD Tunas Muda penyajian pendapatan dan beban dalam laporan sisa hasil usaha disajikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima pada tahun berjalan dan beban yang dikeluarkan pada tahun berjalan. KUD Tunas Muda membagi pendapatan menjadi lebih rinci berdasarkan jenis pendapatan yang ada. Namun KUD Tunas Muda membuat laporan sisa hasil usaha tidak berurutan sesuai dengan standar yang ada. Dimana KUD Tunas Muda menulis secara acak penempatan pendapatan dan beban yang ada. Seharunya letak pendapatan lain-lain di dalam laporan sisa hasil usaha terletak di atas beban,

namun dilaporan yang ada tertulis dari **Pendapatan** -> **Beban** -> **Pendapatan Lain Lain**. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan standar dari SAK ETAP itu sendiri. Sehingga dapat dilihat dari keseluruhan letak pos-pos akun pendapatan dan beban yang ada pada laporan Sisa Hasil Usaha KUD Tunas Muda di atas dapat dikatakan belum signifikan.

Selain itu di dalam SAK ETAP pajak pendapatan harus disisihkan karena SAK ETAP mensyaratkan untuk menyisihkan bagian dari pihak ke 3 sementara di dalam laporan sisa hasil usaha KUD Tunas Muda pajak dari pendapatan belum dihitung. Selanjutnya, menurut SAK ETAP beban haruslah diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan sifat atau fungsi beban. Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja. Hal ini telah diterapkan secara keseluruhan oleh KUD Tunas Muda, koperasi Tunas Muda di dalam laporan sisa hasil usahanya memiliki dua klasifikasi beban yaitu beban usaha dan beban umum dan administrasi, hal ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai sifat beban melalui subklasifikasi pada masing-masing beban menurut fungsi tersebut di dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain memiliki ekuitas selama periode tersebut.

KUD Tunas Muda menyusun laporan perubahan ekuitas. Ekuitas yang dimiliki oleh KUD Tunas Muda berasal dari:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk anggota. Simpanan pokok pada pos simpanan pokok KUD Tunas Muda sudah sesuai dengan SAK ETAP dimana telah diakui sebagai ekuitas, dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan pada pos simpanan pokok. Simpanan pokok pada KUD Tunas Muda dicatat sebesar Rp. 4.315.000.00.-, dan simpanan pokok belum terbayar sudah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah uang yang tidak harus sama besarnya yang wajib dibayarkan kepada koperasi selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Dalam pencatatan KUD Tunas Muda simpanan wajib diakui sebagai ekuitas dan dicatat berdasarkan nilai nominal. simpanan wajib pada KUD Tunas Muda dicatat sebesar Rp. 143.955.550.00.-, dan simpanan wajib belum terbayar diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

c. Simpanan wajib khusus

Simpanan wajib khusus yakni dana yang disisihkan oleh koperasi untuk menutupi piutang tak tertagih yang tidak dapat dimasukkan dalam golongan piutang tak tertagih. Simpanan wajib khusus pada KUD Tunas Muda sebesar Rp.3.075.691.00.-, simpanan wajib khusus pada KUD Tunas Muda tidak sepenuhnya menggunakan SAK ETAP, dimana simpanan wajib khusus diakui sebagai ekuitas, dicatat berdasarkan nominal, disajikan pada pos simpanan wajib khusus, namun tujuan dan penggunaan dari simpanan wajib khusus tidak dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan.

d. Cadangan

Cadangan ialah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota, cadangan koperasi diakui sebagai ekuitas dan dicatat berdasarkan nilai

nominalnya. Cadangan koperasi disajikan pada pos cadangan untuk tujuan dan penggunaan dari cadangan koperasi diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. KUD Tunas Muda mencatat cadangan koperasi sebesar Rp.467.103.363.-, cadangan pada KUD Tunas Muda tidak sepenuhnya menggunakan SAK ETAP, dimana cadangan telah diakui sebagai ekuitas, dicatat berdasarkan nilai nominal, disajikan pada pos cadangan koperasi, namun tujuan dan penggunaan dari cadangan koperasi tidak dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan.

e. Donasi

Donasi adalah uang atau barang modal yang mempunyai nilai moneter, yang diterima dari pihak lain. KUD Tunas Muda mencatat donasi sebesar Rp. 11.800.000.00.-, donasi pada KUD Tunas Muda sudah sepenuhnya menggunakan SAK ETAP, dimana donasi telah diakui sebagai ekuitas, dicatat berdasarkan nilai nominal, disajikan pada pos donasi, dan mencatat hal yang perlu diungkapkan dari jenis donasi yang didapat baik terikat maupun tidak terikat.

f. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (SHU)

Sisa hasil usaha tahun berjalan adalah sisa hasil usaha yang belum di atur secara jelas pembagiannya. Sisa hasil usaha tahun berjalan diakui sebagai hak koperasi dan merupakan ekuitas dari koperasi. Pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan diungkapkan pada laporan perubahan ekuitas koperasi sebesar nilai nominalnya. KUD Tunas Muda mencatat sisa hasil usaha sebesar Rp. 186.197.941.24.-, SHU KUD Tunas Muda telah sepenuhnya menggunakan SAK ETAP, dimana telah diakui sebagai ekuitas, dicatat berdasarkan nilai nominal, disajikan pada pos sisa hasil usaha tahun berjalan, dan pembagian dari sisa hasil usaha tahun berjalan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan memuat informasi mengenai ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu badan usaha, yang terjadi selama 1 periode, seperti satu bulan, atau satu semester atau satu tahun.

Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan pengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

KUD Tunas Muda menyediakan perubahan arus kas pada periode yang dilaporkan yaitu tahun 2019. Dalam penyajiannya KUD Tunas Muda telah menyajikan tiga komponen informasi yang diharuskan tersedia pada laporan arus kas yakni:

- a. Aktivitas operasi
- b. Aktivitas investasi
- c. Aktivitas pendanaan

Dan KUD Tunas Muda telah memberikan informasi berupa perubahan kas dan setara kas selama satu periode. Hal ini disimpulkan bahwa KUD Tunas Muda telah membuat laporan arus kas sesuai dengan standar SAK ETAP.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan pada koperasi berisi pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan lain-lain, dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.

Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa dalam catatan atas laporan keuangan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan, adapun komponen dari ringkasan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengungkapan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

SAK ETAP hanya mengatur kriteria informasi yang harus disajikan pada laporan keuangan saja. Sedangkan untuk penyajian dan jenis

informasi lain yang harus disajikan dirujuk pada peraturan menteri koperasi tahun no 4 tahun 2012 di antaranya adalah:

- a. Kegiatan bisnis dengan non anggota yang ditargetkan
- b. Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi anggotanya

Dari data yang diperoleh dapat dianalisis yaitu dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan KUD Tunas Muda, mencatat kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan, kegiatan bisnis untuk non anggota tidak diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, dan aktivitas koperasi mempromosikan ekonomi anggotanya tidak diungkapkan pada laporan keuangan. Hal ini disimpulkan bahwa catatan atas laporan keuangan KUD Tunas Muda tidak sepenuhnya mengikuti SAK ETAP sebab KUD Tunas Muda tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.

KUD Tunas Muda pada tahun 2020 mengalami perubahan operasional, dimana sebelumnya KUD Tunas Muda beroperasi sebagai koperasi konvensional berubah menjadi koperasi syariah. Hal ini berdasarkan hasil dari rapat umum anggota tahunan yang diadakan oleh KUD Tunas Muda pada akhir tahun 2019. Dikarenakan adanya perubahan operasional, hal ini membuat KUD Tunas Muda merubah laporan keuangan dari basis konvensional menjadi basis syariah. Diantara perubahan-perubahannya yang ada dalam laporan keuangan KUD Tunas Muda ialah sebagai berikut:

1. Pada laporan keuangan tahun 2020 terdapat pos piutang dari pembiayaan murabahah yang sebelumnya pada tahun 2019 tidak ada dilaporan keuangan dikarenakan KUD masih beroperasi konvensional. Dalam hal ini berarti KUD Tunas Muda menggunakan pembiayaan murabahah untuk para anggotanya. Pada posnya yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan terdapat piutang

murabahah sebesar Rp. 116.461.665,00.- dan margin murabahah yang ditanggihkan sebesar Rp. (22.670.000.00).-

2. Pada laporan keuangan 2020 terdapat pos Qard yang sebelumnya pada tahun 2019 tidak ada dilaporan keuangan dikarenakan KUD masih beroperasi konvensional. Pada posnya terdapat Qardh hasan sebesar Rp. 3.500.000.00.- yang telah dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Pada laporan keuangan 2020 terdapat pos aset murabahah yang pada tahun 2019 tertulis dengan nama pos persediaan. Posnya yaitu Aset Murabahah sebesar Rp. 1.541.000.00.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dari kenyataan yang telah ditemui sepanjang analisis, dalam kasus ini maka dapat disimpulkan bahwasanya KUD Tunas Muda belum sepenuhnya menerapkan standar SAK ETAP. Dari 13 point yang ada. KUD Tunas Muda hanya menerapkan 8 Point yang sesuai standar SAK ETAP diantaranya ialah : kas dan setara kas, aset tetap, hutang usaha, simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, SHU, dan laporan arus kas. Hal ini terlihat bahwa KUD Tunas Muda menerapkan SAK ETAP sebesar 61% dari keseluruhan point penerapan yang ada pada SAK ETAP.

B. Saran

Peneliti memaparkan saran dari kesimpulan yang didapat, diantaranya:

1. Kepada Manajemen Perusahaan

Dalam laporan sisa hasil usaha sebaiknya pajak dari pendapatan dihitung dan dalam catatan atas laporan keuangan sebaiknya dijelaskan metode apa yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas, laporan sisa hasil usaha, dan laporan arus kas, kegiatan bisnis untuk non anggota dan aktivitas koperasi mempromosikan ekonomi anggotanya sebaiknya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Dan dalam catatan atas laporan keuangan sebaiknya KUD Tunas Muda menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam laporan sisa hasil usaha, hal ini agar pengguna informasi bisa memahami laporan keuangan tersebut dengan lebih baik.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Saya berharap penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya, terutama bagi peneliti yang ingin melakukan analisa,

harapannya agar peneliti lebih dalam lagi dalam menganalisis bagaimana penerapan SAK ETAP ini di perusahaan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Erhas. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi di Indonesia*. Jakarta PT Ercontara Rajawali, 2010
- Al- Quran Al-karim dan Terjemahannya
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Edisi 5.2002
- Hendar dan Kusnandi. *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Hendra, dkk. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Medan: madenatera, 2019
- Ikatan akuntansi Indonesia, SAK ETAP. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009
- Ikhsan, *Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Pinrang*. Makassar: universitas muhammadiyah, 2018
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit : Rajagrafindo Persada, 2004
- Nuraini, utami, dwi. *Badan usaha dan koperasi dalam perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: istana media, 2018
- Nurhidayah, Wiwin. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya. Penerapan Psaka 27 Untuk Menilai Kewajaran Laporan Keuangan Pada Koperasi Kariawan Petrokimia Gresik. Telah Di Publikasikan, 2010
- Prasetyo david. *Koperasi Unit Desa*. Kalimantan barat: cv. Derwati press, 2019
- Pratiwi, hidayati. *analisis penerapan standar akuntansi keuangan pada koperasi karyawan bersama PT. EPFM*. Vol. 5. (hlm. 15-27). Makassar, 2016
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: citapustaka Media, 2012
- Salprida. Skripsi. Universitas Gunadarma .Jakarta. Akuntansi Koperasi Berbasis Etap Studi Kasus Pada Koperasi Petani Karet Karya Harapan. Telah Di Publikasikan, 2010

Sari kartika.. *Mengenal Koperasi*. Karanganom: cempaka putih, 2019

Siyoto sandu, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: literasi media publishing, 2015

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

LAMPIRAN



KOPERASI UNIT DESA "TUNAS MUDA"

DESA TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK
BADAN HUKUM : NO. 105/BBPAD/KWK 4/5.1/II/1996
HP. 0819 5934 9399 / 0878 9358 9060 / 0819 7621 891



Teluk Merbau, 19 Agustus 2020

Nomor : 056 /KUD-TM/TM-DY/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : Balasan

Kepada Yth,
DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan
Di-
MEDAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan
Nomor: B-3109/EB.I/K.S.02/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 hal Izin Riset, pada mahasiswa:

Nama : Sri Lestari
NIM : 0502172369
Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester : VI (Enam)
Judul Skripsi : *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus : Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Muda Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun)*

Dengan ini diberitahukan bahwa kami menerima permohonan saudara. Adapun sebagai informasi bahwa KUD Tunas Muda awal tahun 2020 baru konversi dari operasional konvensional ke operasional syariah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat kami,
Pengurus KUD TUNAS MUDA
Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun

Ketua

Sekretaris

SETTYONO

DI ARIANTO, ST

Arsip

KUD. MANDIRI " TUNAS MUDA "
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018/9
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KEJERANGAN	CTT	31 DES 2019	31 DES 2018
ASET			
ASET LANCAR/LANCAR			
Kas & setara Kas	2f. 3.1	Rp. 4.070.127.838,96	Rp. 4.998.912.347,90
Pinang Usaha	2g. 3.2	3.636.125.957,69	3.698.151.831,79
Penyisihan Pinang Ragu-Ragu		-	-
Pinang Dana-Dana	3.3	-	43.330.647,00
Permodalan	2h. 3.4	-	166.563.665,00
Jumlah Aset Lancar		Rp. 7.726.253.786,65	Rp. 8.906.958.491,69
ASET TIDAK LANCAR/LANCAR			
Penyertaan	3.5	201.351.700,00	201.231.700,00
Aset Tetap, Nilai Buku	2j. 3.6	182.727.499,72	414.598.237,97
Aset lain-lain	3.7	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah Aset tidak Lancar		Rp. 404.079.199,72	Rp. 635.829.937,97
JUMLAH ASET		Rp. 8.130.332.986,37	Rp. 9.542.788.429,66
LIABILITAS & KEKAYAAN BERSIH			
LIABILITAS LANCAR			
Simpanan Anggota	3.8	2.691.177.492,02	3.763.526.682,08
SHU Bagian Anggota	3.9	6.284.221,48	7.722.842,18
Hutang Dana-Dana SHU	3.10	11.582.810,78	11.993.678,20
Hutang Dana-Dana Lainnya	3.11	2.767.238.395,00	353.655.802,90
Biaya Ymh. Dibayar	3.12	60.000.000,00	75.000.000,00
Jumlah Liabilitas Lancar		Rp. 5.536.282.919,28	Rp. 4.211.899.005,36
LIABILITAS JK. PANJANG			
Hutang Lain-Lain	3.13	Rp. 301.239.019,00	Rp. 3.129.582.022,00
Jumlah Kewajiban JK. Panjang		Rp. 301.239.019,00	Rp. 3.129.582.022,00
KEKAYAAN BERSIH			
Simpanan Pokok	3.14	Rp. 4.315.000,00	Rp. 4.355.000,00
Simpanan Wajib	3.15	143.955.550,00	140.513.550,00
Simpanan Wajib Khusus	3.16	3.075.691,00	3.075.691,00
Cadangan	3.17	1.943.466.865,85	1.878.069.335,55
Donasi	3.18	11.800.000,00	11.800.000,00
SHU Tahun Berjalan	2.k. 3.19	186.197.941,24	163.493.825,75
Jumlah Kekayaan Bersih		Rp. 2.292.811.048,09	Rp. 2.201.307.402,30
JUMLAH LIABILITAS & KEKAYAAN BERSIH		Rp. 8.130.332.986,37	Rp. 9.542.788.429,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

KUD. MANDIRI " TUNAS MUDA "
LAPORAN SISA HASIL USAHA
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CTT	TAHUN 2019	TAHUN 2018
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha	2d, 3.20	Rp. 51.108.834.967,00	Rp. 69.499.178.675,00
Harga Pokok Pendapatan			
Persediaan Awal		Rp. 166.563.665,00	Rp. 177.432.575,00
Pembelian	2d, 3.21	49.780.612.034,51	68.222.348.988,00
Barang Tersedia untuk Dijual		Rp. 49.947.175.699,51	Rp. 68.399.781.563,00
Persediaan Akhir		-	(166.563.665,00)
		Rp. 49.947.175.699,51	Rp. 68.233.217.898,00
Beban Usaha	2d, 3.22	171.210.895,00	230.771.995,00
Harga Pokok Penjualan		Rp. 50.118.386.594,51	Rp. 68.463.989.893,00
SHU Kotor		Rp. 990.448.372,49	Rp. 1.035.188.782,00
Beban Umum & Administrasi	2d, 3.23	808.250.431,25	878.644.956,25
SHU Bersih		Rp. 182.197.941,24	Rp. 156.543.825,75
Pendapatan (Beban) Luar Usaha	3.24		
Pendapatan Lain-Lain		Rp. 4.000.000,00	Rp. 6.950.000,00
		Rp. 4.000.000,00	Rp. 6.950.000,00
SHU Tahun Berjalan		Rp. 186.197.941,24	Rp. 163.493.825,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

KUD. MANDIRI " TUNAS MUDA "
LAPORAN PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Kekayaan Bersih	Kumulatif Saldo Laba Ditahan	Jumlah Kekayaan Bersih
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp. 4.355.000,00	Rp. -	Rp. 4.355.000,00
Simpanan Pokok	125.141.550,00	15.372.000,00	140.513.550,00
Simpanan Wajib	3.075.691,00	-	3.075.691,00
Simpanan Wajib Khusus	11.800.000,00	-	11.800.000,00
Donasi	1.801.252.642,55	76.816.693,00	1.878.069.335,55
Cadangan	-	163.493.825,75	163.493.825,75
SHU Tahun Berjalan	Rp. 1.945.624.883,55	Rp. 255.682.518,75	Rp. 2.201.307.402,30
Saldo Kekayaan Bersih Per 31 Desember 2018	Rp. 1.945.624.883,55	Rp. 255.682.518,75	Rp. 2.201.307.402,30
Perubahan Selama Tahun 2019	Rp. 4.355.000,00	Rp. (40.000,00)	Rp. 4.315.000,00
Kenaikan Simpanan Pokok	140.513.550,00	3.442.000,00	143.955.550,00
Kenaikan Simpanan Wajib	3.075.691,00	-	3.075.691,00
Kenaikan Simpanan Wajib Khusus	11.800.000,00	-	11.800.000,00
Donasi	1.878.069.335,55	65.397.530,30	1.943.466.865,85
Cadangan	163.493.825,75	(163.493.825,75)	-
Pembagian SHU Tahun 2018	-	186.197.941,24	186.197.941,24
SHU Tahun 2019	Rp. 2.201.307.402,30	Rp. 91.503.645,79	Rp. 2.292.811.048,09
Saldo Kekayaan Bersih Per 31 Desember 2019	Rp. 2.201.307.402,30	Rp. 91.503.645,79	Rp. 2.292.811.048,09

KUD. MADIRI " TUNAS MUDA "
LAPORAN ARUS KAS DAN BANK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
AKTIVITAS OPERASI		
SHU Tahun Berjalan	Rp. 186.197.941,24	Rp. 163.493.825,75
Penyesuaian :	31.870.738,25	33.182.758,25
- Penyusutan Aset Tetap	Rp. 218.068.679,49	Rp. 196.676.584,00
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan modal kerja	42.025.874,10	393.767.475,00
- Piutang Usaha	-	(80.107.502,00)
- Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	43.330.647,00	600.000.000,00
- Piutang Dana-Dana	166.563.665,00	10.868.910,00
- Persediaan	(1.072.349.190,06)	(237.965.819,76)
- Simpanan Anggota	(1.438.620,70)	(48.168.442,00)
- SHU Bagian Anggota	(410.867,42)	11.204.173,00
- Hutang Dana-Dana SHU	2.413.582.592,10	(23.317.794,00)
- Hutang Dana-Dana Lainnya	(15.000.000,00)	15.000.000,00
- Biaya Ymh. Dibayar	(2.828.343.003,00)	-
- Hutang Lain-Lain	Rp. (1.033.970.223,49)	Rp. 837.957.584,24
Arus Kas dan Bank dari (untuk) Aktivitas Usaha		
AKTIVITAS INVESTASI		
- Penyertaan	Rp. (120.000,00)	Rp. -
- Koreksi Akk. Penyusutan	(17.133.700,00)	-
- Penambahan Aset Tetap	-	(230.000.000,00)
- Pengurangan Aset Tetap	217.133.700,00	-
- (Penambahan) Pengurangan Aset Lain-Lain	-	2.108.979.222,00
Arus Kas dan Bank dari (untuk) Aktivitas Investasi	Rp. 199.880.000,00	Rp. 1.878.979.222,00
AKTIVITAS PENDANAAN		
- Simpanan Pokok	Rp. (40.000,00)	Rp. -
- Simpanan Wajib	3.442.000,00	15.372.000,00
- Simpanan Wajib Khusus	-	-
- Cadangan	65.397.530,30	76.816.693,00
- Pembagian SHU 2017	(163.493.825,75)	(192.041.731,70)
Arus Kas dan Bank dari (untuk) Aktivitas Pembiayaan	Rp. (94.694.295,45)	Rp. (99.853.038,70)
Penambahan (Penurunan) Saldo Kas & bank	Rp. (928.784.518,94)	Rp. 2.617.083.767,54
Saldo Kas dan Bank Awal Tahun	4.998.912.347,90	2.381.828.580,36
Saldo Kas dan Bank Akhir Tahun	Rp. 4.070.127.828,96	Rp. 4.998.912.347,90

KOPERASI BERBA USAHA
KUD TUNAS MUDA OPERASIONAL SYARIAH

Jl Panglima Besar Kampung Tahun Marbau

LAPORAN NERACA
Per 31 Des 2020

ASET	JMLAH	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	JMLAH
ASET LANCAR	4.129.730.353,03	KEWAJIBAN	5.904.598.540,00
Kas dan Setara Kas	3.854.883.831,33	Kewajiban Jangka Pendek	4.888.598.714,00
Kas Beker	3.854.883.831,33	Simpangan Mutiara	2.880.888.888,00
Penempatan Pada Bank	32.100.000,00	Simpangan Sukamati	2.007.709.826,00
Deposito	32.100.000,00	Hutang	225.888.888,00
Deposito Bank Syariah	32.100.000,00	Hutang Dana Arahana	225.888.888,00
Hutang	275.280.125,00	Hutang Gawe-gawahan	2.452.948.910,00
Hutang Murabahah	118.461.665,00	Hutang SHU Bagian Anggota	30.710.287,00
Margin Murabahah Yg Dibangunkan +	(23.670.000,00)	Hutang Dana - Dana SHU	30.710.287,00
Hutang TBG/Pendat ymh diterima	162.117.510,00	Hutang Dana Perumahan	2.258.590.000,00
Hutang Biaya Rekening	18.370.950,00	Hutang Dana Arisan	180.000,00
Pembayaran	- 2.705.550.987,20	Hutang Dana Jalan	10.778.121,00
Pembayaran Anggote	763.520.731,00	Hutang Dana Gedung	10.000.000,00
Pembayaran Non Anggote	507.505.614,20	Hutang Dana MDA	180.000,00
Pembayaran Tunai	1.410.996.315,00	Hutang SHU Pengurus	9.388.887,00
Pembayaran Lahan Pancing	23.528.327,00	Hutang SHU Karyawan	9.388.887,00
Qardh	- 3.500.000,00	Kewajiban Jangka Panjang	288.750.886,00
Qardul Hasan	3.500.000,00	Hutang Subsidi 6884	40.000.000,00
Persediaan / Aset Murabahah	1.541.000,00	Hutang Beal Subsidi	140.000.000,00
Persediaan Pupuk	1.541.000,00	Hutang Dana Amalia	81.824.000,00
Hutang Lain-lain	20.000.000,00	Hutang Dana Perumahan	27.210.888,00
Dana Likuiditas Subsidi BSM	20.000.000,00	Titipan	36.216.882,00
Aset Lancar Lain	36.783.410,00	Titipan Pupuk	8.220.888,00
Echamel	36.783.410,00	Titipan Sayur / Selayono	40.000.000,00
ASET TIDAK LANCAR	771.864.586,62	Titipan Sidi R	2.734.180,00
Penyerahan dan Investasi	201.251.700,00	Titipan Humadi / Wawarba	60.000,00
Penyerahan Pada PUSKUD	1.680.000,00	EKUITAS	1.887.948.287,20
Penyerahan Pada KUB	199.671.700,00	Modal Disetor Anggote	111.888.888,00
Aset Tetap	544.512.886,62	Simpangan Pokok	2.125.000,00
Tanah	37.100.000,00	Simpangan Wajib	180.741.000,00
Bangunan	506.240.665,00	Simpangan Wajib Khusus	2.075.887,00
Kendaraan	416.350.000,00	Dana Cadangan	2.817.948.942,00
Inventaris dan Peralatan Kantor	45.258.577,00	Cadangan Umum	2.817.948.942,00
Peralatan Usaha	2.235.123,00	Donasi	11.888.888,00
Akm. Penyusutan Aset Tetap +	(515.711.476,38)	SHU Tahun Berjalan	(244.830.228,10)
Akm.Penyusutan Bangunan +	(513.717.143,38)		
Akm.Penyusutan Inventaris & Peral. Kantor +	(1.594.330,00)		
Aset Tidak Berwujud	26.000.000,00		
IT Madani Mart	26.000.000,00		
Amortisasi Software +	(25.000.000,00)		
Akm.Amortisasi +	26.000.000,00		
System USSJ +			

PERHITUNGAN LABA RUKA
KUD TUNAS MUDA OPERASIONAL-SYARIAN
Periode: 31 Desember 2019

KODE PERKIRAAN	PERKIRAAN	Jumlah
4	PENDAPATAN	46.365.229.885,00
401	Pendapatan Operasional	46.365.229.885,00
40101	Pendapatan Operasional (Penyuturan Sisa)	7.355.355,00
4010101	Sal. Pihak Ketiga Bukan Bank	7.355.355,00
401010101	Pend. Margin Keuntungan	6.415.000,00
401010110	Pendapatan Hasil Pelayanan Anggota	2.615.000,00
401010111	Pendapatan Hasil Non Pelayanan Anggota	30.000,00
40102	Pendapatan Operasional Lainnya	46.357.877.530,00
4010204	Pendapatan Administrasi	2.515.000,00
401020403	Pend. Material	2.515.000,00
4010205	Pendapatan Populasi Modal	455.750,00
4010210	Pendapatan Penyutan TBS	46.347.347.530,00
4010215	Pendapatan Penyutan Pajak	1.850.000,00
4010299	Pendapatan Lain-Lain	6.250.207,00
	TOTAL PENDAPATAN	46.365.229.885,00

KODE PERKIRAAN	BIAYA	Jumlah
5	BIAYA	46.857.875.000,00
502	Biaya Operasional	46.857.875.000,00
50204	Biaya Tenaga Kerja	305.000.000,00
5020401	Biaya Gaji/Bonus Karyawan	155.000.000,00
5020403	Biaya Korp. ambu	500.000,00
5020404	Biaya Turun-turun dari Biaya & Pakan	22.500.000,00
5020408	Biaya BP JS Kewajiban/keuntungan	450.000,00
5020413	Biaya Honorarium Pengurus	1.070.000.000,00
5020414	Biaya Uang Saku	1.800.000,00
50209	Pajak-Pajak (Tidak Termasuk Pajak Penghasilan)	105.455.541,00
5020904	Biaya Pajak KUK	25.850.750,00
5020905	Biaya Pajak PBB	756.548,00
5020907	Biaya Pajak HSD 2016	70.000.750,00
50213	Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	35.214.813,00
5021307	Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	35.214.813,00
50217	Biaya Perkoperasian	45.222.250.000,00
5021701	Honorarium Pengurus BP/BPP	25.200.000,00
5021704	Biaya Pembelian TBS	45.200.000.000,00
5021705	Biaya Beban Usah	11.507.000,00
50224	Biaya Barang dan Jasa	78.100.000,00
5022401	Biaya Pak Listrik & Air Kotor	5.425.000,00
5022407	Biaya Bongkar Pupa	350.000,00
5022409	Biaya Transportasi	35.000.000,00
5022414	Biaya APDES KUK	500.000,00
5022415	Biaya Konsumsi	17.870.000,00
5022416	Biaya Perjalanan Dinas	200.000,00
5022419	Biaya Organisasi	400.000,00



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SAK

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

**ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK**

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan berdasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

ISBN:

978-979-9020-61-1

Cetakan Pertama: Mei 2009

Cetakan Kedua: Maret 2013

Cetakan Ketiga: Oktober 2013

Cetakan Keempat: November 2015

Cetakan Kelima: November 2016

Cetakan Keenam: Maret 2018

Cetakan Ketujuh: Maret 2019

Diterbitkan oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Badan Penyelenggara Akuntansi Publik

Perman Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Kantor Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190 4232 Fax: (021) 3900018

Email: standar@iaindonesia.or.id, iaa@iaindonesia.or.id

PENGANTAR

SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009.

Jakarta, 19 Mei 2009

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Jumadi	Anggota
L. Sensi Wondabio	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Saptoto Agustino	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Bab 1 Ruang Lingkup	1
Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif.....	3
Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan	11
Bab 4 Neraca	15
Bab 5 Laporan Laba Rugi	19
Bab 6 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba ...	21
Bab 7 Laporan Arus Kas.....	23
Bab 8 Catatan atas Laporan Keuangan	27
Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan	29
Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu.....	33
Bab 11 Persediaan.....	39
Bab 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak	43
Bab 13 Investasi pada <i>Joint Venture</i>	45
Bab 14 Properti Investasi	47
Bab 15 Aset Tetap.....	49
Bab 16 Aset Tidak Berwujud	55
Bab 17 Sewa.....	59
Bab 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi.....	63
Bab 19 Ekuitas.....	71
Bab 20 Pendapatan	77
Bab 21 Biaya Pinjaman.....	83
Bab 22 Penurunan Nilai Aset.....	85
Bab 23 Imbalan Kerja	89

RUANG LINGKUP

1.1 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

1.2 Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- (a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

1.3 Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

KONSEP DAN PRINSIP PERVASIF

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

2.1 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN

Dapat Dipahami

2.2 Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

Relevan

2.3 Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Materialitas

2.4 Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

Keandalan

2.5 Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian

secara jujur apa yang seharusnya disajikan atas yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

Substansi Mengungguli Bentuk

2.6 Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Pertimbangan Sehat

2.7 Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

Kelengkapan

2.8 Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

Dapat Dibandingkan

2.9 Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarentitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antarperiode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

Tepat Waktu

2.10 Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

2.11 Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

POSISI KEUANGAN

2.12 Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
- (b) Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

2.13 Beberapa pos mungkin memenuhi definisi aset atau kewajiban namun tidak dapat diakui sebagai aset atau kewajiban dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam paragraf 2.24–2.29. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari dalam entitas harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas sebelum suatu aset atau kewajiban diakui.

Aset

2.14 Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset.

2.15 Beberapa aset, misalnya aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Beberapa aset adalah tidak berwujud.

2.16 Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial. Misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa adalah aset jika entitas mengendalikan manfaat yang diharapkan mengalir dari properti tersebut.

Kewajiban

2.17 Karakteristik esensial dari kewajiban (*liability*) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:

- (a) oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- (b) akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

2.18 Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

Ekuitas

2.19 Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas.

KINERJA KEUANGAN

2.20 Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut:

- (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

2.21 Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas lebih lanjut dalam paragraf 2.2–2.29.

Penghasilan

2.22 Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- (a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.
- (b) Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

Beban

2.23 Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

- (a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap.
- (b) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

PENGAKUAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

2.24 Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
- (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2.25 Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan.

Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan

2.26 Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu kepada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk pos-pos yang signifikan secara individual dan kelompok dari suatu populasi besar dari pos-pos yang tidak signifikan secara individual.

Keandalan Pengukuran

2.27 Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi.

2.28 Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

2.29 Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan.

PENGUKURAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

2.30 Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

2.31 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- (a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- (b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN BERPENGARUH LUAS (PERVASIF)

2.32 Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari *Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan*. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk transaksi atau peristiwa lain, paragraf 9.4 memberikan panduan untuk membuat pertimbangan dan paragraf 9.5 menetapkan hirarki yang diikuti oleh entitas dalam memutuskan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam keadaan tersebut. Pada tingkat kedua hirarki tersebut mensyaratkan entitas untuk menggunakan prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif yang diatur dalam Bab ini.

DASAR AKRUAL

2.33 Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

PENGAKUAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Aset

2.34 Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Kewajiban

2.35 Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini; dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Penghasilan

2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Beban

2.37 Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Laba atau Rugi

2.38 Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.39 SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan *"matching concept"*.

SALING HAPUS

2.40 Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK ETAP.

- (a) Pengukuran nilai aset secara neto dari penilaian penyisihan bukan merupakan saling hapus, misalnya penyisihan atas keusangan persediaan dan penyisihan atas piutang tak tertagih.
- (b) Jika aktivitas entitas yang biasa tidak termasuk membeli dan menjual aset tidak lancar (termasuk investasi dan aset operasional), maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

RUANG LINGKUP

3.1 Bab ini menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP, dan pengertian laporan keuangan yang lengkap.

PENYAJIAN WAJAR

3.2 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif*. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

KEPATUHAN TERHADAP SAK ETAP

3.3 Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secata penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

KELANGSUNGAN USAHA

3.4 Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

FREKUENSI PELAPORAN

3.5 Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- (a) fakta tersebut;
- (b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan
- (c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

PENYAJIAN YANG KONSISTEN

3.6 Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode harus konsisten kecuali:

- (a) terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan pencrapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*; atau
- (b) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

3.7 Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

3.8 Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- (a) alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- (b) sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

INFORMASI KOMPARATIF

3.9 Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

MATERIALITAS DAN AGREGASI

3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

3.11 Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

LAPORAN KEUANGAN LENGKAP

3.12 Laporan keuangan entitas meliputi:

- (a) neraca;
- (b) laporan laba rugi;
- (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- (d) laporan arus kas; dan

- (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

3.13 Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.

3.14 Karena paragraf 3.9 mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah pada laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan), suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

3.15 Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama.

IDENTIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

3.16 Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
- tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam Bab 25 *Mata Uang Pelaporan*;
- pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

3.17 Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:

- domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;
- penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

NERACA

RUANG LINGKUP

4.1 Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu - akhir periode pelaporan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA

4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang usaha dan piutang lainnya;
- (c) persediaan;
- (d) properti investasi;
- (e) aset tetap;
- (f) aset tidak berwujud;
- (g) utang usaha dan utang lainnya;
- (h) aset dan kewajiban pajak;
- (i) kewajiban diestimasi;
- (j) ekuitas.

tidak ada li th 2015.

4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.

4.4 SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

KLASIFIKASI ASET DAN KEWAJIBAN

4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Aset Lancar

4.6 Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- (a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- (b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- (c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- (d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

4.7 Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Kewajiban Jangka Pendek

4.8 Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:

- (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- (b) dimiliki untuk diperdagangkan;
- (c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- (d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

4.9 Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

URUTAN DAN FORMAT POS DALAM NERACA

4.10 SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. Paragraf 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Sebagai tambahan:

- (a) pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas; dan
- (b) uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas.

4.11 Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian:

- (a) sifat dan likuiditas aset;
- (b) fungsi aset dalam entitas; dan
- (c) jumlah, sifat dan waktu kewajiban.

INFORMASI DISAJIKAN DI NERACA ATAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.12 Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan:

- (a) kelompok aset tetap;
- (b) jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya;
- (c) persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari:
 - (i) persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
 - (ii) persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut;
 - (iii) bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa;
- (d) kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya;
- (e) kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas.

4.13 Entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca atau catatan atas laporan keuangan:

- (a) untuk setiap kelompok modal saham:
 - (i) jumlah saham modal dasar;
 - (ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
 - (iii) nilai nominal saham;
 - (iv) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;
 - (v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;
- (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

4.14 Entitas selain berbentuk Perseroan Terbatas, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara seperti disyaratkan dalam paragraf 4.13(a), yang menunjukkan perubahan selama periode untuk setiap kategori ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan untuk setiap kategori ekuitas.

LAPORAN LABA RUGI

RUANG LINGKUP

5.1 Bab ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

5.2 Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat Bab 9 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*).

INFORMASI YANG DISAJIKAN DI LAPORAN LABA RUGI

5.3 Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) pendapatan;
- (b) beban keuangan;
- (c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- (d) beban pajak;
- (e) laba atau rugi neto.

5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

5.5 Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai "pos luar biasa", baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

ANALISIS BEBAN

5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas; mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Analisis Menggunakan Sifat Beban

- (a) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

Pendapatan	Misalnya:		
	Pendapatan		x
	Pendapatan operasi lain		x
	Perubahan persediaan barang jadi dan barang dalam proses	x	
Beban	Bahan baku yang digunakan	x	
	Beban pegawai	x	
	Beban penyusutan dan amortisasi	x	
	Beban operasi lainnya	x	
	Jumlah beban operasi		(x)
	Laba operasi		x

Analisis Menggunakan Fungsi Beban

- (b) Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Misalnya:

Pendapatan	x
Beban pokok penjualan	(x)
Laba bruto	x
Pendapatan operasi lainnya	x
Beban pemasaran	(x)
Beban umum dan administrasi	(x)
Beban operasi lain	(x)
Laba operasi	x

5.7 Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi.

5.8 Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA

RUANG LINGKUP

6.1 Bab ini mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tujuan

6.2 Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Informasi yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas

6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- (a) laba atau rugi untuk periode;
- (b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- (c) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*;
- (d) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - (i) laba atau rugi;
 - (ii) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - (iii) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

LAPORAN LABA RUGI DAN SALDO LABA

Tujuan

6.4 Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

Informasi yang Disajikan di Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

6.5 Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 *Laporan Laba Rugi*:

- (a) saldo laba pada awal periode pelaporan;
- (b) dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;
- (c) penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;
- (d) penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan
- (e) saldo laba pada akhir periode pelaporan.

LAPORAN ARUS KAS

RUANG LINGKUP

7.1 Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

SETARA KAS

7.2 Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN ARUS KAS

7.3 Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Aktivitas Operasi

7.4 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- (a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- (b) penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain;
- (c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- (d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
- (e) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- (f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

Aktivitas Investasi

7.5 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture* (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

Aktivitas Pendanaan

7.6 Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
- pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
- penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
- pelunasan pinjaman;
- pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

7.7 Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

7.8 Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak dari:

- perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan;
- pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan
- semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN

7.9 Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

BUNGA DAN DIVIDEN

7.10 Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antarperiode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.

7.11 Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas operasi karena termasuk laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau hasil investasi.

7.12 Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena dividen dibayarkan dari arus kas operasi.

PAJAK PENGHASILAN

7.13 Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

TRANSAKSI NONKAS

7.14 Entitas mengeluarkan dari laporan arus kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

7.15 Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi nonkas dalam laporan arus kas adalah konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Contoh transaksi nonkas adalah:

- (a) perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan.
- (b) akuisisi suatu entitas melalui emisi saham.
- (c) konversi utang menjadi modal.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.

PENGUNGKAPAN LAIN

7.17 Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

RUANG LINGKUP

8.1 Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

STRUKTUR

8.2 Catatan atas laporan keuangan harus:

- (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;
- (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- (c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

8.3 Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

8.4 Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3);
- (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5);
- (c) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- (d) pengungkapan lain.

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

8.5 Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan:

- (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

INFORMASI TENTANG PERTIMBANGAN

8.6 Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 8.7) dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

INFORMASI TENTANG SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

8.7 Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang:

- (a) sifat; dan
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

CURRICULUM VITAE

Nama : **SRI LESTARI**
Tempat/ Tanggal Lahir : Siak, 2 juli 1999
Umur : 22 Tahun
NIM : 0502172369
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. 2 No. B47 Pulo Brayan Bengkel
No. HP/WA : 0852-6046-0505
Fak/Jur/Sem : FEBI/ Akuntansi Syariah/ VIII
Alamat Fakultas/Universitas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
No. Telp Fakultas/Universitas : 061-6615693-6622925



Latar Belakang Pendidikan

-SD : SD Negeri 015 Desa Sawit Permai
-SMP : SMP Negeri 01 Kecamatan Dayun
-SMA : SMA Negeri 01 Kecamatan Lubuk Dalam

Nama Orang Tua

Ayah : Rudi Purwanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Khalidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Medan, 2 juli 2021



SRI LESTARI